

SKRIPSI

**ANALISIS PENGARUH FISKAL TERHADAP
PERTUMBUHAN EKONOMI DALAM PERSPEKTIF
EKONOMI ISLAM (STUDI DI BANDA ACEH
PERIODE 2010-2019)**



Disusun Oleh:

**T. KHAIRUL FAHMI
NIM. 160602141**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGRI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2023 M/1445 H**

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : T. Khairul Fahmi
NIM : 160602141
Program Studi : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan Skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya ilmiah karya orang lain.*
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
- 5. Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya melanggar pernyataan ini, maka siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 20 Juni 2023

Yang menyatakan,



T. Khairul Fahmi

PERSETUJUAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

**Analisis Pengaruh Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi
Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Di Banda Aceh
Periode 2010-2019)**

Disusun Oleh:

T. Khairul Fahmi
NIM. 160602141

Disetujui untuk disidangkan dan dinyatakan bahwa isi dan
formatnya
telah memenuhi syarat penyelesaian
Studi pada Program Studi Ekonomi Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Pembimbing I



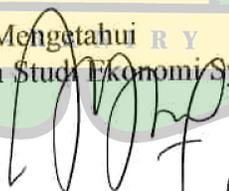
Dr. Nilam Sari, M. Ag
NIP: 197103172008012007

Pembimbing II



Hafizh Maulana, Sp., S.Hi., ME
NIP: 2006019002

A R Mengetahui R Y
Ketua Program Studi Ekonomi Syariah,



Dr. Nilam Sari, M. Ag
NIP: 197103172008012007

LEMBAR PENGESAHAN MUNAQASYAH SKRIPSI

ANALISIS PENGARUH FISKAL TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (STUDI DI BANDA ACEH PERIODE 2010-2019)

T KHAIRUL FAHMI
NIM. 160602141

Telah Disidangkan Oleh Program Studi Strata Satu (S1)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Menyelesaikan Program Studi Strata Satu Bidang Ekonomi Syariah

Pada Hari/Tanggal:

Kamis, 20 Juli 2023 M
2 Muharram 1445 H

Banda Aceh
Tim Penilai Sidang Hasil Skripsi
Sekretaris

Ketua


Dr. Nilam Sari, M.Ag.
NIP: 197103172008012007


Hafizh Maulana, SP.,S.,HI.,ME
NIP: 2006019002

Penguji I


Dr. M. Zulfilmi, S.Ag., M.A.
NIP: 197042820005011003

Penguji II


Hafidbah, S.E., M.Si, Ak.CA
NIDN: 2012108203

Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh


Dr. Hafas Furqani, M. Ec
NIP. 198006252009011009



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7552921, 7551857, Fax. 0651-7552922

Web: www.library.ar-raniry.ac.id, Email: library@ar-raniry.ac.id

**FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH
MAHASISWA UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : T Khairul Fahmi
NIM : 160602141
Fakultas/Program Studi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Syariah
E-mail : Tkhairulfahmi10@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah:

Tugas Akhir KKU Skripsi (tulis jenis karya ilmiah)

yang berjudul:

**ANALISIS PENGARUH FISKAL TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI
DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (STUDI DI BANDA ACEH PERIODE
2010-2019)**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh berhak menyimpan, mengalih-media formatkan, mengelola, mendiseminasikan, dan mempublikasikannya di internet atau media lain. Secara *fulltext* untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis, pencipta dan atau penerbit karya ilmiah tersebut. UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh akan terbebas dari segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Banda Aceh

Pada tanggal : 15 Agustus 2023

Mengetahui

Penulis

Pembimbing I

Pembimbing II

T Khairul Fahmi
160602141

Dr. Nilam Sari, M.Ag.
NIP: 197103172008012007

Hafiz Maulana, SP., S., HI., ME
NIP: 2006019002

KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur *Alhamdulillah* penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Analisis Pengaruh Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Di Banda Aceh Periode 2010-2019)”

Shalawat beriring salam tak lupa pula penulis ucapkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga dan para sahabatnya yang telah memberikan contoh suri teladan dalam kehidupan manusia yang membawa kita dari alam kebodohan kepada alam yang berilmu pengetahuan. Skripsi ini merupakan salah satu syarat menyelesaikan pendidikan sarjana (S1) pada Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa ada beberapa kesilapan dan kesulitan, namun berkat bantuan dari berbagai pihak *Alhamdulillah* penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagaimana mestinya. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada:

1. Dr. Hafas Furqani, M. Ec selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry. Dr. Fithriady, Lc., MA selaku Wakil Dekan I, Dr. Israk Ahmadsyah, B, Ec., M.Ec., M.Sc selaku Wakil Dekan II dan Dr.Analiansyah.,M.Ag selaku

Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

2. Dr. Nilam Sari, M. Ag selaku ketua Program Studi Ekonomi Syariah, dan Ayumiati, SE, M.Si selaku Sekretaris Program Studi Ekonomi Syariah.
3. Hafiihz Maulana, SP., S.H.I., M.E dan selaku ketua Laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
4. Dr. Nilam Sari, M. Ag selaku pembimbing I dan Hafiihz Maulana, SP., S.H.I., M.E selaku pembimbing II yang telah banyak membantu, memberikan ilmu dan meluangkan waktu serta tak bosan-bosannya memberi arahan dan nasehat kepada penulis demi kesempurnaan skripsi ini.
5. Dr. Nilam Sari, M. Ag selaku Penasehat Akademik (PA) penulis selama menempuh pendidikan di Program Studi Ekonomi Syariah.
6. Seluruh staf dan dosen-dosen yang mengajar pada Program Studi Ekonomi Syariah, terima kasih atas ilmu yang engkau berikan kepada penulis.
7. Kedua orang tua yang terhormat dan yang tercinta Ayahanda T. Mahyuddin dan Ibunda Rusnah Yusuf yang telah mendidik, memberikan bimbingan hidup, memberikan dukungan ketika penulis putus asa, yang selalu menyemangati dan menyayangi serta do'a yang tiada henti kepada penulis.

8. Terima kasih kepada keluarga yang selalu mendoakan, menyayangi dan memberikan dorongan materil maupun spiritual kepada penulis hingga terselesaikannya skripsi ini.
9. Terima kasih teman-teman seperjuangan Program Studi Ilmu Ekonomi 2016 dan teman-teman di luar kampus yang telah memberikan motivasi, dukungan dan membantu penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
10. Terima kasih kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebut satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Semoga segala bantuan, motivasi, ilmu dan arahan yang diberikan dapat menjadi amalan yang baik serta diberikan balasan oleh Allah SWT. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan pihak-pihak yang membutuhkan.

Banda Aceh, 22 Juni 2023

Penulis,

جامعة الرانيري
A R - R A N I R Y

T. Khairul Fahmi

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan bersama menteri agama dan menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	t
2	ب	B	17	ظ	Z
3	ت	T	18	ع	'
4	ث	S	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	H	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Z	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ء	'
14	ص	S	29	ي	Y
15	ض	D			

2. Vokal

Vokal dalam Bahasa Arab, seperti vokal Bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau

diftong.

a. Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
َ	<i>Fathah</i>	A
ِ	<i>Kasrah</i>	I
ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
يَ	<i>Fatah dan ya</i>	Ai
وَ	<i>Fatah dan wau</i>	Au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *hauila*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
يَ / آ	<i>Fathah dan alif atau ya</i>	Ā
يِ	<i>Kasrah dan ya</i>	Ī
يُ	<i>Dammah dan wau</i>	Ū

Contoh:

قَالَ : *qala*

رَمَى : *rama*

قِيلَ : *qila*

يَقُولُ : *yaqulu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

a. Ta marbutah (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harakat *fathah, kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta marbutah (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harakat *sukun*, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudhah al-athfal/raudhatul athfal*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madinah al-Munawwarah/ al-Madinatul
Munawwarah*

طَلْحَةُ : *Tahah*

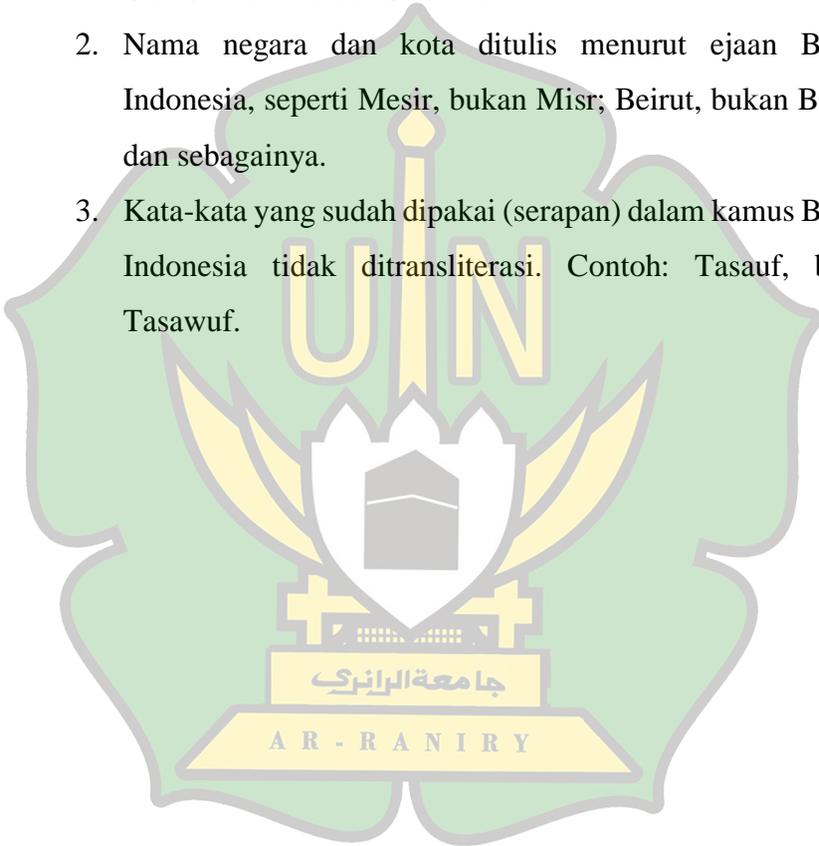
Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail, sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.

Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.

2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



ABSTRAK

Nama : T. Khairul Fahmi
NIM : 160602141
Fakultas/Program Studi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Syariah
Judul : Analisis Pengaruh Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi di Banda Aceh Periode 2010-2019)
Pembimbing I : Dr. Nilam Sari, M. Ag
Pembimbing II : Hafizh Maulana, SP., S., HI., ME

Penelitian ini dilakukan di kota Banda Aceh, dan penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus terhadap pertumbuhan Ekonomi, variabel penelitian ini adalah Dana bagi hasil (X1) dana alokasi umum (X2) dana alokasi khusus (X3) dan Pertumbuhan Ekonomi (Y), sampel dalam penelitian ini adalah rentang waktu 10 tahun. Data yang digunakan adalah data skunder 10 tahun dari BPS Banda Aceh, dengan menggunakan metode *Multiple Linear Regression Analysis*. Hasil dari penelitian ini variabel dana bagi hasil tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan Ekonomi Banda Aceh, variabel dana alokasi umum berpengaruh terhadap pertumbuhan Ekonomi di kota Banda Aceh, variabel dana alokasi khusus berpengaruh terhadap pertumbuhan Ekonomi, dan X1, X2, dan X3 secara bersama-sama berpengaruh terhadap pertumbuhan Ekonomi

Kata Kunci: *Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Pertumbuhan Ekonomi, Multiple Linear Regression Analysis.*

DAFTAR ISI

Halaman

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH.....	I
LEMBAR PERSETUJUAN SIDANG SKRIPSI	II
LEMBAR PENGESAHAN MUNAQASYAH SKRIPSI.....	III
FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	IV
KATA PENGANTAR.....	V
TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN.....	VIII
ABSTRAK	XII
DAFTAR ISI.....	XIII
DAFTAR TABEL.....	XVI
DAFTAR GAMBAR.....	XVII
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	18
1.3 Tujuan Penelitian	19
1.4 Manfaat Penelitian	19
1.4.1 Manfaat Praktis (Oprasional)	19
1.4.2 Manfaat Teoritis (Akademis)	20
1.5 Sistematika Penulisan.....	20
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	22
2.1 Pertumbuhan Ekonomi Islam	22
2.1.1 Pengertian Pertumbuhan Ekonomi Islam	22
2.1.2 Asas Pertumbuhan Ekonomi Islam.....	23
2.1.3 Prinsip Pembangunan Islam	25
2.1.4 Tujuan Islam	26
2.1.5 Perbandingan Ekonomi Islam dan Ekonomi Konvensional	27
2.2 Pendapatan Asli Daerah	29
2.3 Dana Bagi Hasil	33
2.4 Dana Alokasi Umum.....	35
2.5 Dana Alokasi Khusus	38
2.6 Penelitian Terkait	40
2.7 Hubungan antar Variabel	44
2.7.1 Hubungan antar Dana Bagi Hasil dengan Pertumbuhan Ekonomi.....	44

2.7.2	Hubungan antar Dana Alokasi Umum dengan Pertumbuhan Ekonomi.....	46
2.7.3	Hubungan antar Dana Alokasi Khusus dengan Pertumbuhan Ekonomi.....	47
2.8	Kerangka Berpikir.....	49
2.9	Hipotesis Penelitian.....	49
BAB III METODE PENELITIAN.....		50
3.1	Jenis Penelitian.....	50
3.2	Sumber Data.....	50
3.2.1	Data Sekunder.....	50
3.3	Teknik Pengumpulan Data.....	51
3.3.1	Dokumentasi.....	51
3.3.2	Studi Pustaka.....	51
3.4	Populasi dan Sampel.....	52
3.5	Operasional Variabel.....	52
3.6	Teknik Pengolahan Dan Analisis Data.....	54
3.7	Uji Asumsi Klasik.....	54
3.8.1	Uji Normalitas.....	55
3.8.2	Uji Multikolinearitas.....	55
3.8.3	Uji Autokorelasi.....	56
3.8.4	Uji Heteroskedastisitas.....	56
3.8	Pengujian Hipotesis.....	57
3.9.2	Koefisien determinasi (R^2).....	57
3.9.3	Uji f Atau Uji Simultan.....	58
3.9.4	Uji t Uji Parsial.....	58
3.9.5	Analisis Regresi Linear Berganda.....	59
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....		60
4.1	Gambaran Umum dan Objek Penelitian.....	60
4.1.1	Gambaran Umum.....	60
4.1.2	Sejarah Kota Banda Aceh.....	61
4.1.3	Sektor Ekonomi Kota Banda Aceh.....	62
4.2	Hasil Penelitian.....	63
4.2.1.	Pertumbuhan Ekonomi.....	64
4.2.2.	Dana Bagi Hasil.....	65
4.2.3.	Dana Alokasi Umum.....	66
4.2.4.	Dana Alokasi Khusus.....	67
4.3	Asumsi Klasik.....	69
4.3.1.	Uji Normalitas.....	69
4.3.2.	Uji Multikolinieritas.....	70

4.3.3.	Uji Autokorelasi	71
4.3.4.	Analisis Regresi Linier Berganda	72
4.4	Uji Hipotesis	73
4.4.1	Koefisien Determinasi (R^2)	73
4.4.2	Uji Parsial (Uji t)	74
4.4.3	Uji Simultan (Uji F)	76
4.5	Pembahasan	76
4.5.1	Pengaruh Dana Bagi Hasil Terhadap Pertumbuhan Ekonomi	76
4.5.2	Pengaruh Dana Alokasi Umum Terhadap Pertumbuhan Ekonomi	79
4.5.3	Pengaruh Dana Alokasi Khusus Terhadap Pertumbuhan Ekonomi	80
4.5.4	Pengaruh Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Secara Simultan	81
4.5.5	Pandangan Ekonomi Islam Mengenai Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kota Banda Aceh Tahun 2010-2019	82
BAB V KESIMPULAN		88
5.1	Kesimpulan	88
5.2	Saran	91
DAFTAR PUSTAKA		93
LAMPIRAN		96



DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1. 1 Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum Dan Dana Alokasi Khusus Kota Banda Aceh tahun 2010 – 2019 (dalam juta rupiah)	5
Tabel 1. 2 Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Aceh berdasarkan 24 Kabupaten/Kota Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Tahun 2010-2017 (Dalam Persen).....	7
Tabel 3. 1 Definisi Operasional Variabel.....	53
Tabel 4. 1 Produk Domestik Regional Bruto Kota Banda Aceh Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha.....	64
Tabel 4. 2 Realisasi Dana Bagi Hasil Tahun 2010-19	66
Tabel 4. 3 Realisasi Dana Alokasi Umum Tahun 2010-2019.....	67
Tabel 4. 4 Realisasi Dana Alokasi Khusus Tahun 2010-19	68
Tabel 4. 5 Hasil Uji Normalitas One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test.....	69
Tabel 4. 6 Hasil Uji Multikolinieritas	70
Tabel 4. 7 Hasil Uji Autokorelasi	71
Tabel 4. 8 Ringkasan Uji Regresi Linier Berganda	72
Tabel 4. 9 Hasil Uji Parsial (Uji t).....	75
Tabel 4. 10 Hasil Uji (Uji F).....	76
Tabel 4. 11 Produk Domestik Regional Bruto Kota Banda Aceh Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (dalam Jutaan Rupiah).....	84
Tabel 4. 12 Total Pendapatan PDRB Perkapita (dengan Migas) Kota Banda Aceh Tahun 2010-2019 (dalam persen)	86

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 2. 1 Skema Kerangka Berpikir49



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pertumbuhan ekonomi dapat menunjukkan sejauh mana kegiatan ekonomi akan menghasilkan pendapatan tambahan bagi masyarakat dalam periode tertentu dengan menggunakan indikator tingkat pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang mencerminkan besarnya nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan produksi dalam perekonomian.

Indonesia memasuki awal Era baru Otonomi Daerah dengan diterapkan dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah yang kemudian diperbarui dengan UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 yang diperbaharui dengan UU No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Otonomi daerah dan desentralisasi fiskal bukanlah konsep baru di Indonesia. Pelaksanaan desentralisasi fiskal pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan pendapatan daerah. Aspek pertumbuhan ekonomi daerah merupakan faktor penting dalam menentukan besarnya transfer pemerintah pusat ke daerah. Desentralisasi fiskal dan otonomi daerah terkait dengan fenomena pemekaran daerah di Indonesia sebagaimana yang diterapkan dalam desentralisasi fiskal di kota Banda Aceh. Desentralisasi fiskal ini juga ditandai dengan fenomena pemekaran daerah dalam jumlah yang relatif lebih

signifikan, dan hampir seluruh kota Banda Aceh telah dimekarkan hingga mencapai 9 kecamatan di setiap daerah. Islam adalah agama yang sempurna yang memiliki aturan-aturan dalam mengatur segala persoalan yang ada dalam kehidupan, baik dalam mengatur urusan ibadah kepada muamalah maupun meliputi segala persoalan yang ada di Negara dan Pemerintahannya. Dalam sistem pemerintahan Islam, organisasi merupakan hal yang sangat penting. Menurut seorang pemikir terkemuka pada abad ke-5 yang sering dikenal dengan Al-Mawardi, ia berpendapat bahwa pelaksanaan imamah. Kepemimpinan politik agama adalah kekuasaan mutlak dan pembentukannya adalah suatu keharusan untuk pemeliharaan agama dan pengelolaan dunia. Dalam hal ini, negara memiliki peran aktif untuk mewujudkan tujuan material dan spiritual. Dalam Islam, pemenuhan pekerjaan dan kepentingan umum bagi umat merupakan kewajiban agama dan moral penguasa. Berdirinya suatu negara tergantung pada kemampuan pemerintah untuk mengumpulkan pendapatan dan mendistribusikannya untuk kebutuhan kolektif masyarakat.

Dalam ajaran Islam, kebijakan fiskal merupakan kewajiban di setiap negara yang juga merupakan hak rakyat. Dengan demikian, kebijakan fiskal ini bukan semata-mata keharusan untuk meningkatkan perekonomian atau meningkatkan kesejahteraan rakyat, tetapi lebih untuk menciptakan mekanisme distribusi ekonomi yang berkeadilan. Sebab, pada dasarnya masalah ekonomi yang terjadi biasanya disebabkan oleh distribusi harta itu sendiri. Jadi, uang yang berasal dari masyarakat dipandang sebagai amanah

di tangan penguasa dan harus diarahkan pada setiap lapisan masyarakat yang lemah dan miskin, sehingga tercipta keamanan dan kesejahteraan umum.

Dalam khazanah keilmuan peradaban Islam pembangunan ekonomi Islam sangat erat hubungannya dengan menjadikan bumi makmur. Dalam pandangan Ibnu Khaldun pembangunan erat sekali dengan *umran al-'alam*. Istilah ini mainstream dengan sosial, tamadun dan perkotaan (dalam arti luas). Tafsir lebih luas tadi ialah pembangunan yang dimaksud bukan hanya pembangunan yang bersifat fisik, namun juga meliputi jasmani dan rohani dalam mencapai kebahagiaan dan kemakmuran seluruh manusia di dunia dan akhirat. Rasulullah pun menetapkan sebuah dasar-dasar pembangunan pada spirit dunia dan *ukhrawi* yaitu pada akhlak dan akidah sebagai semangat kerja menjadi landasan utamanya. Dalam upaya membangun peradaban, Rasulullah meletakkan dasarnya pada: pertama, membangun masjid sebagai pusat peradaban (bukan hanya fungsi ibadah namun juga sebagai aktivitas *muamalah*). Kedua, menjalin hubungan yang baik antara kaum anshar dan muhajirin dalam mengambnagkan perdagangan dan pertanian. Ketiga, membuat kebijakan yang mengatur hak serta kewajiban masyarakat agar terwujudnya kehidupan yang aman dan damai. Keempat, mendirikan *baitul mall* sebagai pusat dalam pengelolaan dasar keuangan negara, nantinya hasil dari pengelolaan dana tersebut untuk pembangunan, pendidikan dan pengentasan kemiskinan.

Dari catatan sejarah awal sejarah Islam, ditemukan bahwa para

perancang keuangan dan pembuat kebijakan berusaha memahami masalah keuangan yang ada di daerah taklukan dan menilainya berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Ada beberapa karya fuqaha sebelumnya yang membahas keuangan publik dan segala kebijakannya. Salah satunya adalah kitab al-Kharaj. Karya monumental ini dikaitkan dengan ahli fikih dan ulama besar Qady Ab Yusuf. Dengan daya analisis yang tinggi, Yusuf mencoba menganalisis masalah keuangan dan menyarankan beberapa kebijakan yang harus diambil untuk kesejahteraan rakyat. Menurut UU No. 32 Tahun 2004 yang diubah menjadi UU No. 23 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Seiring dengan bertambahnya jumlah wilayah administrasi di Kota Banda Aceh, ditambah dengan pemberian kewenangan yang lebih luas kepada pemerintah kabupaten/kota untuk menyelenggarakan pemerintahan, yang disertai dengan penyerahan penyediaan dana untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan tersebut. Dengan demikian jumlah dana dari pemerintah pusat yang mengalir ke pemerintah daerah di Kota Banda Aceh dalam bentuk dana perimbangan juga semakin meningkat seperti terlihat pada Tabel 1.1 realisasi dana bagi hasil, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus. dana tahun 2010-2019.

Tabel 1. 1
Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum Dan Dana Alokasi Khusus Kota Banda Aceh tahun 2010 – 2019 (dalam juta rupiah)

No	Tahun	Dana Bagi Hasil (pajak + non pajak)	Dana Alokasi umum	Dana Alokasi Khusus
1	2010	Rp 56.390.722.335	Rp 328.073.282.000	Rp 21.351.600.000
2	2011	Rp 44.782.694.482	Rp 406.480.305.000	Rp 29.636.400.000
3	2012	Rp 41.925.074.867	Rp 491.593.554.000	Rp 26.893.570.000
4	2013	Rp 33.101.195.105	Rp 567.628.828.000	Rp 31.003.110.000
5	2014	Rp 36.564.945.848	Rp 610.554.730.000	Rp 38.833.120.000
6	2015	Rp 25.039.648.050	Rp 612.503.568.000	Rp 42.758.540.000
7	2016	Rp 30.872.881.469	Rp 602.292.108.000	Rp 168.636.091.947
8	2017	Rp 40.255.959.285	Rp 591.711.772.000	Rp 105.782.661.134
9	2018	Rp 40.072.750.406	Rp 591.711.772.000	Rp 116.595.706.007
10	2019	Rp 36.187.097.917	Rp 605.014.830.000	Rp 111.593.861.259

Sumber data: BPS Kota Banda Aceh (data diolah)

Berdasarkan Tabel 1.1 di atas, jumlah dana bagi hasil, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus setiap tahunnya masih mengalami pasang surut. Dana bagi hasil tertinggi pada tahun 2010 sedangkan 3 tahun setelahnya mengalami penurunan, sedangkan dana alokasi umum tahun 2014-2015 mengalami peningkatan yang cukup besar namun pada tahun 2010 mengalami penurunan yang sangat signifikan, dan pada dana alokasi khusus sangat signifikan.

Peningkatan terjadi pada tahun 2016 tanpa Stabilitas dana yang diberikan ke daerah akan menentukan pertumbuhan ekonomi yang bervariasi.

Proses pembentukan modal menghasilkan peningkatan output nasional dalam beberapa cara, dengan modal pemerintah menyediakan faktor-faktor produksi. Dengan peningkatan dana bagi hasil, dana lokasi umum dan dana alokasi. Secara khusus, pemerintah kabupaten/kota di wilayah Kota Banda Aceh dituntut untuk dapat mengalokasikan belanjanya pada program dan kegiatan yang berorientasi pada peningkatan pelayanan publik yang lebih efisien dan efektif, sehingga diharapkan benar-benar bermanfaat dan menjadi stimulus bagi pertumbuhan ekonomi daerah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat, namun harapan tersebut belum sepenuhnya terwujud.

Daerah diberi kewenangan yang lebih besar untuk mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri. Tujuan kewenangan tersebut adalah untuk lebih mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat, memudahkan masyarakat untuk memantau dan mengontrol penggunaan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dan untuk menciptakan persaingan yang sehat antardaerah, serta mendorong timbulnya inovasi. Sejalan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah diharapkan mampu menggali sumber-sumber keuangan khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan di daerahnya melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD), PAD yang

merupakan salah satu sumber penerimaan daerah memiliki keterkaitan dengan pertumbuhan Ekonomi. Kota Banda Aceh merupakan salah satu kota yang tingkat pertumbuhannya masih fluktuatif. Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, besaran PDRB atas dasar harga konstan dapat dilihat pada Tabel 1.2 berikut ini:

Tabel 1. 2
Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Aceh berdasarkan 24 Kabupaten/Kota Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Tahun 2010-2019 (Dalam Persen)

Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Per Kapita Per Kabupaten/Kota Tahun 2010-2019												
No	Kabupaten/Kota	Tahun										Rata-rata
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
1	Aceh	22,45	23,43	24,29	25,22	26,07	25,81	26,85	28,19	29,52	30,88	26,262
2	Aceh Barat	25,57	26,23	26,08	27,18	28,75	30,08	31,25	34,44	37,35	38,56	30,549
3	Aceh Barat Daya	17,65	18,42	18,86	19,52	20,13	21,11	22,15	23,29	24,54	25,74	21,14
4	Aceh Besar	20,22	20,92	21,99	23,62	25,09	26,31	27,36	28,45	29,83	31,64	25,523
5	Aceh Jaya	18,43	19,32	19,96	20,74	21,35	22,93	24,55	25,99	26,67	27,72	22,666
6	Aceh Selatan	13,93	14,84	15,67	16,81	17,78	18,88	19,92	20,99	22,11	22,93	18,373

Tabel 2.1 - Lanjutan

Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Per Kapita Per Kabupaten/Kota Tahun 2010-2019												
No	Kabupaten/Kota	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Rata-rata
7	Aceh Singkil	11,73	12,6	13,4	14,2	15,03	15,86	16,97	17,8	18,53	19,62	15,574
8	Aceh Tamiang	17,38	17,83	18,56	19,92	20,75	20,71	21,43	22,71	24,02	25,13	20,844
9	Aceh Tengah	22,5	23,8	25,2	26,94	28,42	29,96	31,47	32,91	34,43	35,73	29,15
10	Aceh Tenggara	12,99	14,01	14,91	15,9	16,89	17,83	18,99	20,36	21,46	23,01	17,635
11	Aceh Timur	20,08	20,78	21,38	21,84	22,22	20,44	20,99	21,79	22,55	23,11	21,539
12	Aceh Utara	32,21	34,5	35,53	35,52	34,83	27,98	28,13	29,05	30,77	31,96	32,045
13	Banda Aceh	44,7	46,86	49,35	52,5	54,11	57,91	61,99	64,21	66,46	69,25	56,734
14	Bener Meriah	19,68	20,83	22,13	23,41	24,72	25,95	27,88	28,5	29,96	30,29	25,12
15	Bireuen	18,17	19,16	20,18	21,2	22,18	23,13	24,18	25,18	26,19	27,78	22,743
16	Gayo Lues	17,37	18,63	20	21,3	22,42	23,62	24,96	26,55	27,4	28,1	23,052
17	Langsa	17,44	18,32	19,31	20,52	21,88	23,6	24,88	26,55	27,96	29,7	22,992
18	Lhokseumawe	52,88	51,45	51,96	52,28	49,72	39,89	39,6	40,56	41,6	43,56	46,35
19	Nagan Raya	32,6	33,9	33,8	34,51	35,82	37,24	38,93	40,73	42,11	45,02	37,473

Tabel 2.1 - Lanjutan												
Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Per Kapita Per Kabupaten/Kota Tahun 2010-2019												
No	Kabupaten/Kota	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Rata-rata
20	Pidie	13,97	14,71	15,57	16,61	17,67	18,77	19,93	21,24	22,53	23,84	18,484
21	Pidie Jaya	13,99	13,92	14,77	15,52	16,41	17,47	18,29	19,46	20,55	21,75	17,121
22	Sabang	24,14	25,65	26,94	28,59	30,29	32,22	34,45	37,45	40,43	44,61	32,477
23	Simeulue	13,29	14,05	15,01	16,15	17,32	18,44	19,63	20,76	22,11	23,49	18,021
24	Subulussalam	13,26	13,77	14,59	15,46	16,29	17,22	18,17	19,5	20,23	21,59	17,028

Sumber: BPS Provinsi Aceh, 2010-2019

Berdasarkan informasi pada Tabel 1.2 di atas, laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Banda Aceh dari tahun 2010-2019 terjadi peningkatan yang signifikan, dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus berfluktuasi. Setiap tahun namun kenyataannya tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan Ekonomi di Kota Banda Aceh ini terlihat dari PDRB yang mengalami peningkatan namun masih dibawah Kabupaten Subussalam yang memiliki tingkat pertumbuhan produk domestik bruto rata-rata daerah sebesar 17,028%. Bener Meriah sebesar 25,12% dan Bireun sebesar 22,723%.

Daerah diberi kewenangan yang lebih besar untuk mengurus

dan mengatur rumah tangganya sendiri. Tujuan kewenangan tersebut adalah untuk lebih mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat, memudahkan masyarakat untuk memantau dan mengontrol penggunaan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dan untuk menciptakan persaingan yang sehat antardaerah, serta mendorong timbulnya inovasi. Sejalan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah diharapkan mampu menggali sumber-sumber keuangan khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan di daerahnya melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD), PAD yang merupakan salah satu sumber penerimaan daerah memiliki keterkaitan dengan pertumbuhan Ekonomi.

Perkembangan PAD, DBH, DAU, dan DAK yang cukup signifikan di Kota Banda Aceh, tentunya membuat perekonomian juga ikut bergerak ke arah yang lebih dinamis, sehingga menimbulkan minat dari pelaku usaha maupun pemodal untuk dapat menanamkan investasinya di Kota Banda Aceh yang berdampak pada pertumbuhan Ekonomi Kota Banda Aceh.

Dana Bagi Hasil (DBH) merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Bagi Hasil adalah dana yang bersumber dari APBN berupa pajak dan sumber daya alam, yang didistribusikan ke daerah-daerah berdasarkan angka persentase tertentu dengan memperhatikan potensi daerah penghasil. Dana bagi

hasil terdiri dari dana bagi hasil yang bersumber dari pajak dan dana bagi hasil sumber daya alam. Tujuan DBH adalah untuk memperbaiki keseimbangan vertikal antara pusat dan daerah dengan memperhatikan potensi daerah penghasil. Pembagian DBH dilakukan berdasarkan prinsip. Penyaluran DBH dilakukan berdasarkan prinsip Based on Actual Revenue. Maksudnya adalah penyaluran DBH berdasarkan realisasi penerimaan tahun anggaran berjalan (Pasal 23 UU 33/2004).

DAU adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pembelanjaan. DAU ditetapkan sekurang-kurangnya 26% dari penerimaan dalam negeri yang ditetapkan dalam APBN. DBH merupakan sumber pendapatan daerah yang cukup potensial dan merupakan salah satu modal dasar pemerintah daerah dalam mendapatkan dana pembangunan dan memenuhi belanja daerah yang bukan berasal dari PAD selain DAU dan DAK. Pola bagi hasil penerimaan tersebut dilakukan dengan prosentase tertentu yang didasarkan atas daerah penghasil. Penerimaan DBH pajak bersumber dari: Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21), Pajak Penghasilan Pasal 25 (PPh 25), Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (PPh WPOPDN). Sedangkan penerimaan DBH SDA bersumber dari: Kehutanan, Pertambangan Umum, Perikanan, Pertambangan Minyak Bumi, Pertambangan Gas Bumi, Pertambangan Panas Bumi (Wahyuni dan Adi, 2009).

Menurut Halim (2010:16) “Dana Alokasi Khusus (DAK)

adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan membantu mendanai kegiatan khusus yang menjadi urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional”. Pengertian Dana Alokasi Khusus (DAK) Menurut Peraturan Pemerintah no. 55/2005, yaitu: Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah- daerah tertentu yang memiliki kebutuhan khusus dengan tujuan membantu mendanai kegiatan-kegiatan khusus yang menjadi urusan daerah sesuai dengan prioritas nasional. Pembiayaan kebutuhan khusus memerlukan dana pendamping dari pendapatan APBD umum minimal 10% (sepuluh persen) sebagai komitmen dan tanggung jawab daerah dalam membiayai program-program yang bersifat kebutuhan khusus. DAK dimaksudkan untuk membantu daerah dalam mendanai kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan publik seperti pendidikan, kesehatan, dan pelayanan prasarana masyarakat dalam rangka mendorong percepatan pembangunan daerah dan pencapaian target prioritas nasional”. Dana Alokasi Khusus (DAK) menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, yaitu: Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang berasal dari APBN dialokasikan ke daerah untuk membantu membiayai kebutuhan tertentu. Dana Alokasi Khusus digunakan untuk menutup kesenjangan pelayanan publik antar daerah dengan mengutamakan bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, kelautan dan perikanan, pertanian, infrastruktur pemerintah daerah, dan lingkungan hidup.

Ekonomi Islam pada dasarnya memandang pertumbuhan

ekonomi sebagai bagian dari pembangunan ekonomi. Tumbuhnya faktor-faktor produksi yang berkesinambungan yang mampu memberikan kontribusi bagi kesejahteraan. Dalam Islam, kesejahteraan ini dapat dimaksimalkan jika sumber daya ekonomi dapat dialokasikan sedemikian rupa sehingga dengan mengatur ulang situasi tidak ada yang lebih baik dengan membuat orang lain lebih buruk. Menurut Islam, semua jenis pendapatan dimasukkan ke dalam bait al-mal, kemudian digunakan untuk dua jenis distribusi, anggaran untuk kesejahteraan dan anggaran untuk umum. Anggaran publik berasal dari pendapatan lain-lain, seperti pajak dan bukan pajak. Islam lebih menitikberatkan pada kesejahteraan umatnya daripada pertumbuhan ekonomi semata. Dalam pengelolaan Islam, pemerintah harus mengutamakan kepentingan syariah daripada pertimbangan duniawi.

Dalam Islam, kebijakan fiskal merupakan kewajiban negara dan merupakan hak rakyat, sehingga kebijakan fiskal bukan semata-mata merupakan kebutuhan untuk perbaikan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan rakyat, tetapi lebih pada penciptaan mekanisme distribusi ekonomi yang adil. Karena sifat masalah ekonomi yang melanda umat manusia berasal dari bagaimana distribusi kekayaan di tengah-tengah masyarakat terjadi. Jadi uang rakyat dipandang sebagai titipan di tangan penguasa dan harus diarahkan terlebih dahulu kepada orang-orang yang lemah dan miskin, sehingga tercipta keamanan dan kesejahteraan umum.

Dalam penelitian ini diangkat tema tentang pengaruh fiskal

yang terfokus terhadap dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus karena masih ada pasang surut dana APBD tiap tahunnya yang berdasarkan Tabel 1.1 dan Tabel 1.2 sama juga dengan penelitian yang dilakukan sebelumnya masih memberikan hasil yang rancu.

Suciayu & Fahmi, (2012). Desentralisasi Fiskal dan Pengaruhnya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal secara bersama-sama mempunyai pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, secara individual Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, memiliki pengaruh yang berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, sedangkan Dana Alokasi Khusus tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.

Dedi tri harito (2012). Dampak desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi daerah di Provinsi Jambi. Analisis dilakukan dengan menggunakan model analisis regresi berganda dengan menggunakan metode GLS dan panel pada tingkat kabupaten-kota di Provinsi Jambi yang meliputi periode enam tahun sebelum desentralisasi fiskal dan sembilan tahun setelah desentralisasi fiskal. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan desentralisasi fiskal pasca 2011 memberikan dampak yang relatif lebih baik terhadap pertumbuhan ekonomi daerah di Provinsi Jambi dibandingkan periode sebelumnya.

Anita, Mohammad, & Hamzah, (2014) Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi

Aceh. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Aceh, dan variabel dana alokasi khusus yang memiliki koefisien regresi terbesar, maka dapat disimpulkan bahwa dana alokasi khusus memiliki pengaruh paling besar terhadap pertumbuhan ekonomi di provinsi Aceh.

Rahmah dan Zein (2016) melakukan studi mengenai Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Aceh. Dari hasil penelitian menyatakan bahwa variabel pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan dana bagi hasil berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Aceh.

Mahafir dan Soelistiyo (2017) melakukan studi mengenai Pengaruh PAD, DAU dan DAK terhadap PDRB Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Hasil pengujian menyatakan PAD berpengaruh tidak signifikan dan bersifat negatif terhadap PDRB kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Sedangkan dana alokasi umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB Kabupaten/Kota di provinsi Nusa Tenggara Barat dan dana alokasi khusus berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap PDRB Kabupaten/Kota di provinsi Nusa Tenggara Barat.

Dayana Novita (2018) analisis pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan dana bagi hasil terhadap pertumbuhan ekonomi melalui belanja modal kasus pada 35 kabupaten/kota di provinsi jawa tengah tahun 2012-2016. Metode

yang digunakan pada penelitian ini adalah kualitatif dengan menggunakan data PDB atas dasar harga konstan untuk melihat pertumbuhan ekonomi, pendapat asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dana bagi hasil, dan belanja modal di kabupaten/kota. Pengujian dilakukan dengan analisis jalur (*path analysis*). Hasil dari penelitian model pertama menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan dana bagi hasil secara signifikan berpengaruh terhadap belanja modal. Hasil analisis model kedua menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah, dan alokasi khusus, dan belanja modal secara signifikan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, sedangkan dana alokasi umum dan dana bagi hasil tidak signifikan berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi.

Oktafia et al. (2018) melakukan penelitian tentang Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Produk Domestik Regional bruto (PDRB) Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur. Dari hasil penelitian tersebut ditemukan bahwa hasil uji secara simultan menunjukkan bahwa secara keseluruhan variabel PAD, DAU, DAK berpengaruh positif signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur.

Lian Arke, Debby, dan Daisy (2020) pengaruh pendapatan asli daerah (PAD), dana bagi hasil (DBH), dana alokasi umum (DAU) dan dana alokasi khusus (DAK) terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten Minahasa Tenggara Dianalisis secara sendiri-sendiri

pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen maupun dianalisis secara bersama-sama. Analisis menggunakan analisis regresi berganda. Adapun hasil penelitian ini adalah PAD, DBH, DAU dan DAK berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Minahasa Tenggara jika di analisis secara parsial selanjutnya jika di analisis secara simultan maka PAD, DBH, DAU dan DAK berpengaruh positif dan signifikan terhadap perekonomian di minahasa Tenggara.

Rendy (2022) Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana bagi hasil, dana alokasi khusus, belanja barang dan jasa, belanja modal, dana daerah urusan pendidikan terhadap pertumbuhan ekonomi di daerah kabupaten daerah tertinggal di Indonesia. Data penelitian menggunakan data sekunder yang diperoleh dari DJPK Kementerian Keuangan dan BPS. Metode yang digunakan adalah analisis regresi data panel dengan menggunakan data tahun 2015-2019 di 122 Daerah Tertinggal di Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel pendapatan daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, belanja barang dan jasa, serta dana dinas pendidikan dan pendapatan per kapita berpengaruh positif dan signifikan. Sedangkan variabel belanja modal berpengaruh negatif dan signifikan, dan Dana Bagi Hasil tidak berpengaruh. Hasil regresi menunjukkan nilai adjusted R² sebesar 0,9969 yang berarti bahwa variabel pertumbuhan ekonomi dapat dijelaskan oleh variasi variabel bebas yaitu pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana bagi

hasil, dana alokasi khusus, belanja barang dan jasa, belanja modal, dana daerah untuk pendidikan sebesar 99,69 persen. Sedangkan sisanya sebesar 0,31 persen dijelaskan oleh variabel lain di luar model.

Penelitian ini tindak lanjut dari penelitian Dedi tri harito (2012) sebelumnya. Penelitian ini memiliki beberapa perbedaan dengan penelitian terdahulu yaitu meninjau kembali kibijakan fiskal dan pertumbuhan ekonomi dari perspektif Islam dengan periode 10 tahun dari tahun 2010-2019 di kota Banda Aceh. Dalam penelitian ini dilakukan pada tahun 2020. Pengujian hipotesis dilakukan dengan metode regresi linear berganda. Berdasarkan latar belakang yang diuraikan sebelumnya, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Pengaruh Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi di Kota Banda Aceh periode 2010-2019).”**

1.2 Rumusan Masalah

Identifikasi merupakan hulu penelitian sekaligus upaya untuk menyatakan secara eksplisit pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab. (Tanzeh, 2011:101). Dari latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah Dana bagi hasil berpengaruh terhadap pertumbuhan Ekonomi.
2. Apakah Dana alokasi umum berpengaruh terhadap pertumbuhan Ekonomi.

3. Apakah Dana alokasi khusus berpengaruh terhadap pertumbuhan Ekonomi.
4. Apakah Dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus berpengaruh secara bersama-sama terhadap pertumbuhan Ekonomi.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui:

1. Pengaruh Dana bagi hasil terhadap pertumbuhan Ekonomi.
2. Pengaruh Dana alokasi umum terhadap pertumbuhan Ekonomi.
3. Pengaruh Dana alokasi khusus terhadap pertumbuhan Ekonomi.
4. Pengaruh Dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus terhadap pertumbuhan Ekonomi.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Praktis (Operasional)

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada pemerintah daerah Kota Banda Aceh yang komprehensif mengenai peningkatan pertumbuhan perekonomian melalui dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus Kota Banda Aceh.

1.4.2 Manfaat Teoritis (Akademis)

Adapun manfaat teoritis (Akademis) dalam penelitian ini adalah:

1. Studi ini diharapkan dapat memberikan peneliti tambahan nilai akademis dan wawasan tentang pengaruh dana bagi hasil, dana laokasi umum, dan dana alokasi khusus dalam perspektif Ekonomi Islam.
2. Diharapkan penelitian ini bermanfaat sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya mengenai dampak dana bagi hasil, dana laokasi umum, dan dana alokasi khusus dalam perspektif Ekonomi Islam.
3. Diharapkan penelitian ini bermanfaat bagi perekonomian kota Banda Aceh dalam meningkatkan dan dapat menjaga pertumbuhan Ekonomi Kota Banda Aceh.

1.5 Sistematika Penulisan

Susunan sistematika pembahasan dalam penulisan tentang analisis pengaruh fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi dalam perspektif ekonomi syariah, peneliti uraikan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Merupakan pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, definisi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan sesuai dengan judul skripsi ini.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini menjelaskan landasan teori yang membentuk berbagai teori, kajian terkait atau yang telah dipelajari sebelumnya, model atau kerangka penelitian, dan pengembangan hipotesis yang mendasari dan terkait dengan topik yang diteliti.

BAB III METODE PENELITIAN

Merupakan metode penelitian yang menjelaskan rencana dan prosedur penelitian yang dilakukan untuk menjawab masalah yang dirumuskan. Desain penelitian, lokasi penelitian, variabel penelitian, populasi dan sampel, definisi operasional variabel, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian dan teknik pengukuran, teknik pengujian instrumen dan analisis data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Merupakan hasil penelitian dan pembahasan yang memuat uraian tentang objek penelitian, hasil penelitian dan pembahasan yang mendalam tentang temuan serta menjelaskan implikasinya. Bab ini akan memaparkan profil objek penelitian, pengujian dan hasil analisis data, serta pembahasan hasil data dalam penelitian yang dilakukan.

BAB V PENUTUP

Merupakan penutup yang meliputi kesimpulan dari hasil penelitian, keterbatasan penelitian, dan juga saran untuk penelitian selanjutnya.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pertumbuhan Ekonomi Islam

2.1.1 Pengertian Pertumbuhan Ekonomi Islam

Ada perbedaan dalam menilai pertumbuhan ekonomi antara ekonomi Islam dengan konsep ekonomi kapitalis. Perbedaan tersebut berangkat dari sudut pandang yang berbeda tentang makna dan tujuan hidup. Berangkat dari konsep dasar kapitalis yang tujuan utamanya adalah pemenuhan kebutuhan materi tanpa batas, maka muncullah sikap pemenuhan terhadap barang-barang dan jasa tanpa batas pula. Lain halnya dengan Islam, walaupun memandang perlu materi, akan tetapi Islam tidak melupakan unsur moral-spiritual dan tidak meletakkan materi sebagai tujuan utama, karena dalam ajaran Islam manusia tidak hanya akan menjalani hidup di dunia saja akan tetapi manusia akan dibangkitkan kembali kelak di akhirat. Sikap demikian sejak pertama sudah terintegrasi dalam kehidupan baik sosial, politik atau ekonomi (Mannan 1997:419).

Perbedaan yang paling utama antara konsep pertumbuhan dalam Islam dan konvensional adalah terletak pada asas yang dipakai, dalam Islam unsur spiritualitas (agama) menjadi prioritas utama. Arti agama di sini adalah ajaran agama yang termanifestasi dalam al-Qur'an dan sunnah Rasul. Meskipun prinsip pertumbuhan (ekonomi) dalam Islam berlandaskan al-Qur'an dan al-Hadis, namun ia tidak merinci secara detail yang menyangkut masalah-masalah teknis, akan tetapi hanya menjelaskan secara global yang mencakup petunjuk-petunjuk pokok, kaidah-kaidah, prinsip dan

canbang-cabang penting yang bersifat spesifik, karena masalah ekonomi termasuk masalah kemanusiaan yang dapat mengalami perubahan sesuai dengan lingkungan dan zamannya, sedangkan masalah yang bersifat teknis diselesaikan melalui upaya manusia (ijtihad) sesuai kondisi lingkungan dan zamannya (Ade dan Rohayana 2000:3).

2.1.2 Asas Pertumbuhan Ekonomi Islam

Menurut Khursid Ahmad (1980:178) dalam bukunya *Economic Development In Islamic Framework* adapun asas-asas pertumbuhan dalam ekonomi Islam ada empat yaitu:

1. Tauhid

Konsep tauhid adalah menjelaskan hubungan sesama manusia dengan Allah. Manusia harus patuh pada Allah SWT, kepatuhan manusia kepada Allah dilihat dari tingkah laku atau tindakan mereka mematuhi perintah Allah dan meninggalkan larangan-Nya dengan cara yang ikhlas dan menyeluruh.

2. Rububiyah

Konsep yang menerangkan sifat Allah. Sifat Allah adalah sebagai penguasa di alam ini. Dia yang berkuasa membuat peraturan untuk menjamin dan membimbing kehidupan manusia supaya sempurna dan sejahtera. Dia juga berkuasa untuk menjaga, mengawal, menampung dan mengurus kehidupan makhluk ke arah kesempurnaan.

3. Khalifah

Manusia sebagai utusan Allah di muka bumi ini. Tanggung

jawab utamanya ialah sebagai pemegang amanah Allah dalam segala aspek seperti akhlak, ekonomi, politik dan sosial. Sebagai pemegang amanah, manusia tidak boleh merusak alam ini. Pembangunan yang hendak dijalankan adalah memberi kebaikan seperti yang ajarkan oleh Allah melalui nabi-Nya. Oleh karena itu, manusia wajib menghindari dari melakukan pembangunan dapat merusak, yaitu pembangunan yang membawa kepada keruntuhan, kekacauan dan kezaliman/tidak adil. Asas terpenting untuk melaksanakan tugas khalifah selain daripada iman ialah ilmu. Ilmu yang dimaksudkan ialah ilmu tentang realitas fisik. Merubah kepada kedudukan ilmu tersebut berarti telah mengubah kedudukannya yang asli dan perubahan yang dilakukan menyalahi sunnatullah maka ilmu tersebut akan merusak bukan memperbaiki.

4. Tazkiyah

Tazkiyah merupakan mekanisme utama bagi mewujudkan pertumbuhan termasuk sumber daya manusia. Tazkiyah melibatkan proses penyucian dinamik yang perlu dilakukan oleh setiap umat manusia sekiranya dia mempunyai keinginan untuk maju dan sejahtera. Manusia perlu menyucikan hubungan antara dirinya dengan Allah, manusia dengan manusia dan makhluk lain di dunia.

2.1.3 Prinsip Pembangunan Islam

Di dalam Islam pandangan hidup didasarkan atas pada konsep yang fundamental, yaitu: *tauhid uluhiyah*, *rububiyah*, *khalifah*, *tazkiyah an-nas*, *falah* dan *'adalah* (keadilan). Prinsip *tauhid uluhiyah* menekankan kepercayaan kepada Allah dan semua yang ada di alam merupakan milik-Nya. Dalam pembangunan sumber daya yang ada adalah miliknya dan digunakan untuk kepentingan sosial bukan hanya untuk kepentingan pribadi semata. *Tauhid rububiyyah* mengajarkan bahwa yang menentukan keberhasilan dari perjuangan dan sukses adalah tuhan. Di dalam upaya pembangunan manusia harus menyadari bahwa tujuan mampu terealisasi atas usaha manusia yang dibarengi dengan pertolongan dari tuhan. Pada prinsipnya manusia di ciptakan di bumi untuk menjadi *khalifah* (wakil tuhan). Merupakan sebuah amanah dari tuhan untuk selalu menjaga bumi dan memanfaatkan segala sumber daya yang ada dengan penuh tanggung jawab serta sebagai teladan manusia atau makhluk lain. Serta dalam *tazkiyah an-nas* manusia sebagai aktor perubahan dalam pembangunan harus mempunyai orientasi kebaikan secara sosial. Namun dalam konteks kebaikan yang dimaksud harus relevan dengan *al-falah*, kebaikan tidak hanya untuk kehidupan dunia, namun juga sebagai upaya untuk persiapan kehidupan akhirat. Namun semua prinsip tersebut hanya akan menjadi sebuah prinsip tanpa arah tanpa adanya keadilan dalam sosial ekonomi (*'adalah*).

2.1.4 Tujuan Islam

Kesejahteraan (*falah*) untuk seluruh umat manusia menjadi tujuan inti Islam dalam komitmen terhadap persatuan dan keadilan. Melalui kepuasan fisik salah satu instrumen dalam tolak ukur kesejahteraan, sebab kesenangan mental (batin) dan kebahagiaan hanya bisa diaktualisasikan melalui sebuah kebutuhan materi dan rohani dari setiap individu. Oleh sebab itu, memaksimalkan *output* harus diimbangi dengan penjaminan usaha untuk kesehatan rohani. Hal ini bisa dilihat dibatin manusia, keadilan serta permainan yang jujur dalam lingkup segala interaksi pada manusia. Pembangunan dengan cara inilah yang selaras dengan Islam dalam tujuan syariah (*maqashid syariah*). Pemenuhan kebutuhan spiritual menekankan pada pembangunan moral, kesenangan atas pemenuhan materi yang dilandasi dengan pembangunan manusia dan sumber daya materi dengan pola pemerataan, sehingga semua kebutuhan pada manusia bisa terpenuhi secara utuh dan distribusi dalam pendapatan harta yang adil. Karena hal itu menjadi kewajiban kolektif bagi masyarakat (muslim) untuk melakukan suatu pembinaan dan memberi kesempatan kerja. Salah satu prinsip syariah melarang menimpakan bahaya dan saling membalas bahaya kepada orang lain, maka sebuah upaya pencegahan atas sumber daya alam yang tidak bisa diperbarui dan posisi terhadap lingkungan, karena keduanya sangat berbahaya dan menjadi sebuah kewajiban individu maupun kolektif untuk mencegahnya.

Pertumbuhan Ekonomi menerangkan atau mengukur dari

perkembangan suatu ekonomi. Dalam kegiatan perekonomian yang sebenarnya pertumbuhan ekonomi berarti perkembangan fiskal produksi barang dan jasa yang berlaku disuatu negara/daerah, seperti pertambahan dan jumlah produksi barang industri, perkembangan infrastruktur, pertambahan jumlah sekolah, pertambahan produksi sektor jasa dan pertambahan produksi barang modal (Sukirno, 2004).

2.1.5 Perbandingan Ekonomi Islam dan Ekonomi Konvensional

Yang membedakan antara paham kapitalisme dengan Islam dalam konsep pertumbuhan, menurut Imam Al-Ghazali, bahwa pertumbuhan dalam Islam mencakup tiga aspek penting yaitu pembangunan fisik, mental dan spiritual. Sedangkan menurut Heidar Naqvi (1991:140) pertumbuhan dalam kerangka Islam meliputi aspek moral-spiritual dan material kehidupan manusia dengan rincian berikut:

1. Tuntutan umum Islami untuk menjamin dan mengamankan pendistribusian pendapatan (kemakmuran) secara adil dan menetapkan batas dalam tingkat pertumbuhan yang layak.
2. Mempertahankan equitas antar generasi. Karena pembentukan modal harus di seimbangkan dengan pembentukan modal sumber daya manusia tangguh yang merupakan investasi jangka panjang.

Selain itu jika lihat dari sudut ekonomi, pertumbuhan menurut sistem kapitalis Barat dimana riba masih dijadikan sistem, baik dalam bank dan perdagangan adalah sesuatu yang bertentangan dengan konsep ekonomi Islam. Dalam QS al-Baqarah: 275 dan 278

disebutkan:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ
الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ
قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ
الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ
فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ
عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

“Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.”

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ
الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

“Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan

tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang beriman.”

Berdasarkan uraian di atas dapat dikemukakan bahwa Islam menawarkan konsep keseimbangan antara tujuan duniawi dan ukhrawi. Konsep keseimbangan ini pula yang melandasi ajaran Islam tentang optimalisasi pertumbuhan, karena pertumbuhan yang ditawarkan ekonomi konvensional pada akhirnya mengundang pertanyaan dengan tidak efisiensinya distribusi pendapatan dan dalam memacu pertumbuhan yang pada akhirnya kembali pada ketidak seimbangan.

Di antara komponen yang dapat memacu pertumbuhan juga di antaranya adalah terpenuhinya kebutuhan melalui kesempatan kerja penuh (*full employment*). Syari'ah menganjurkan setiap manusia untuk memenuhi kebutuhan dasarnya untuk kesejahteraan hidupnya. Penggunaan sumberdaya manusia merupakan keharusan bagi manusia untuk kesejahteraan dirinya termasuk di antara tujuan syari'ah, demikian juga pendayagunaan sumber daya alam sebagai bahan untuk mendapatkan hasil yang lebih besar, akan tetapi Islam juga melarang menghambur-hamburkannya (M. Chapra, 1997:127).

2.2 Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) menurut Halim (2010:16), yaitu: Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan yang dipungut dengan peraturan perundang-

undangan (pasal 1 angka 18). Sumber pendapatan asli daerah terdiri dari hasil pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan PAD lain yang sah (pasal 6 ayat 1) Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD) Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 yaitu: Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang terus ditingkatkan agar dapat dimanfaatkan secara optimal untuk kepentingan Pemerintah Daerah. UU RI No.33 Tahun 2004 Pasal 3 tentang Perimbangan. PAD bertujuan untuk memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai wujud dari desentralisasi. PAD dipungut/diperoleh berdasarkan UU RI No.33 Tahun 2004 Pasal 6 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. PAD bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan PAD lain yang sah.

Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD) menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, yaitu: Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah semua pendapatan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Pendapatan Asli Daerah dipisahkan menjadi empat jenis pendapatan yaitu pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, PAD lain yang sah.

Jenis-jenis Sumber Pendapatan Asli Daerah adalah sebagai berikut:

1. Hasil Pajak Daerah

Yovita dalam Arbie (2013) mengemukakan “Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dibebankan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai pelaksanaan pembangunan pemerintah daerah”.

Halim (2007), menyatakan bahwa menurut UU no. 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas UU No. 18 tahun 1997 tentang pajak dan retribusi daerah. Menurut undang-undang, jenis-jenis penerimaan pajak untuk provinsi meliputi objek pendapatan berikut: pajak kendaraan bermotor, biaya transfer kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak kendaraan di atas air, pajak air bawah tanah, pajak air permukaan. Selanjutnya jenis pajak kabupaten/kota terdiri dari: pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak galian kelas C, pajak parkir.

2. Hasil Retribusi Daerah

Yovita dalam Arbie (2013) mendefinisikan “Retribusi daerah adalah retribusi daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang secara khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan, sehingga dalam hal retribusi, balas jasa atas adanya retribusi daerah dapat langsung ditunjuk”.

Lebih lanjut Halim (2007) menjelaskan bahwa jenis-jenis pendapatan retribusi kabupaten/kota meliputi “obyek pendapatan

sebagai berikut: Retribusi Pelayanan Kesehatan, Retribusi Pelayanan Sampah/Kebersihan, Penggantian Biaya Cetak KTP, Retribusi Cetak Akta Pencatatan Sipil, Biaya Jasa Pemakaman, Retribusi jasa kremasi jenazah, retribusi jasa parkir di pinggir jalan umum, retribusi jasa pasar, retribusi pengujian kendaraan bermotor, retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran, retribusi penggantian biaya cetak peta, retribusi pengujian kapal penangkap ikan, retribusi retribusi penggunaan barang milik daerah, retribusi jasa usaha pasar besar atau toko, retribusi jasa usaha tempatlelang, retribusi jasa usaha terminal, retribusi jasa usaha tempat parkir khusus, retribusi jasa usaha penginapan/pensagrahan/villa , Retribusi vaksin jamban, Retribusi rumah potong hewan, Retribusi usaha retribusi jasa kepelabuhanan kapal, retribusi jasa usaha rekreasi dan olah raga, retribusi jasa usaha penyeberangan di atas air, retribusi jasa usaha penjualan hasil produksi daerah, retribusi izin mendirikan bangunan, retribusi izin penjualan minuman beralkohol, retribusi izin gangguan, retribusi izin trayek.

3. Hasil Perusahaan Milik Daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan

Yovita dalam Arbie (2013) menyatakan bahwa hasil BUMD dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya dipisahkan, yaitu “Penerimaan PAD lainnya yang menempati peran penting setelah pajak daerah dan retribusi daerah merupakan bagian Pemerintah Daerah dari keuntungan BUMD. pendirian BUMD adalah untuk menciptakan lapangan kerja atau mendorong pembangunan

ekonomi daerah. Selain itu, BUMD merupakan cara yang lebih efisien dalam melayani masyarakat, dan merupakan sumber pendapatan daerah. Jenis pendapatan yang meliputi hasil pengelolaan kekayaan daerah lain yang dipisahkan, antara lain keuntungan, deviden, dan penjualan saham milik daerah.

Berdasarkan teori-teori di atas, dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah semua pendapatan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Pendapatan Asli Daerah dipisahkan menjadi empat jenis pendapatan yaitu pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, PAD lain yang sah.

2.3 Dana Bagi Hasil

Dana Bagi Hasil (DBH) merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Bagi Hasil adalah dana yang bersumber dari APBN berupa pajak dan sumber daya alam, yang didistribusikan ke daerah-daerah berdasarkan angka persentase tertentu dengan memperhatikan potensi daerah penghasil. Dana bagi hasil terdiri dari dana bagi hasil yang bersumber dari pajak dan dana bagi hasil sumber daya alam.

Tujuan DBH adalah untuk memperbaiki keseimbangan vertikal antara pusat dan daerah dengan memperhatikan potensi daerah penghasil. Pembagian DBH dilakukan berdasarkan prinsip penyaluran DBH dilakukan berdasarkan prinsip Based on Actual

Revenue. Maksudnya adalah penyaluran DBH berdasarkan realisasi penerimaan tahun anggaran berjalan (Pasal 23 UU 33/2004).

Jenis-jenis DBH meliputi DBH Pajak dan DBH Sumber Daya Alam. DBH Pajak meliputi Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Penghasilan dan Cukai Hasil Tembakau. Sedangkan DBH SDA meliputi Kehutanan, Mineral dan Batu Bara, Minyak Bumi dan Gas Bumi, Pengusahaan Panas Bumi dan Perikanan. DBH PBB dan PPh dibagi kepada daerah penghasil sesuai dengan porsi yang ditetapkan dalam UU No. 33/2004. DBH CHT dan DBH SDA dibagi denganimbangan Daerah penghasil mendapatkan porsi lebih besar, dan Daerah lain (dalam provinsi yang bersangkutan) mendapatkan bagian pemerataan dengan porsi tertentu yang ditetapkan dalam UU.

Dana bagi hasil merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Menurut Baldric Siregar (2015:144) yang dimaksud dengan dana bagi hasil adalah sebagai berikut: “Dana bagi hasil merupakan hak daerah atas pengelolaan sumber-sumber penerimaan negara yang dihasilkan dari masing-masing daerah, yang besarnya ditentukan atas daerah penghasil yang didasarkan atas ketentuan perundang-undangan yang berlaku”.

Menurut Toman Sony Tambunan (2019:91) yang dimaksud dengan dana bagi hasil adalah sebagai berikut: “dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi”.

Toman Sony Tambunan (2019:91) juga menjelaskan bahwa dana bagi hasil yang bersumber dari APBN terdiri dari beberapa bagian sebagai berikut:

1. Bagi hasil pajak terdiri dari:

Bagi hasil pajak bumi dan bangunan (PBB), bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB), serta PPH pasal 25 dan pasal 29 wajib pajak orang pribadi dan Pajak penghasilan pasal 21

2. Bagi Hasil Bukan Pajak terdiri dari bagi hasil dari iuran hak pengusahaan hutan (IHPH), iuran tetap, iuran eksplorasi (Royalti).

3. Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Berasal dari penerimaan sumber daya alam kehutanan, pertambangan umum, perikanan, pertambangan minyak bumi, dan pertambangan panas bumi

Berdasarkan kedua definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan dana bagi hasil adalah dana yang bersumber dari APBN, yang dialokasikan untuk kebutuhan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan.

2.4 Dana Alokasi Umum

Menurut Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah menjelaskan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) adalah “Dana yang bersumber dari penerimaan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan

daerah dalam rangka konteks pelaksanaan desentralisasi”.

Dana Alokasi Umum (DAU) adalah transfer dana dalam bentuk “block grant”, artinya apabila dana tersebut diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah bebas menggunakan dan mengalokasikan dana tersebut. sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah agar pemerintah daerah memiliki keleluasaan dalam menggunakan DAU sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi daerah masing-masing.

Dana Alokasi Umum (DAU) menurut Peraturan Pemerintah no. 55/2005. Dana Alokasi Umum adalah dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan belanja masing-masing daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Berdasarkan UU tersebut, Dana Alokasi Umum ditetapkan paling sedikit 26% yang kemudian disalurkan ke provinsi sebesar 10% dan kabupaten atau kota sebesar 90% dari total DAU. Menurut Bratakusmanto dan Solihin (2002:183) “Dana Alokasi Umum (DAU) adalah sesuatu yang bertujuan untuk pemerataan keuangan daerah, termasuk penggantiannya, yang menjamin kelangsungan penyelenggaraan pelayanan dasar kepada masyarakat, dan bersifat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pendapatan umum dan anggaran pendapatan belanja daerah”. Dana Alokasi Umum (DAU) menurut Machfud Siddik dalam Ujang

Bahar adalah: Dana Alokasi Umum (DAU) adalah komponen dana perimbangan dalam APBN yang pengalokasiannya didasarkan pada konsep kesenjangan fiskal atau kesenjangan fiskal. Instrumen penanggulangan ketimpangan horizontal dialokasikan dalam rangka pemerataan kemampuan keuangan antar daerah yang penggunaannya sepenuhnya ditentukan oleh daerah dan hibah Perimbangan berfungsi untuk menetralsir ketimpangan kemampuan keuangan dengan adanya PAD.

Dana alokasi umum ini merupakan sejumlah dana yang harus dialokasikan pemerintah pusat kepada setiap daerah setiap tahun dan dimaksudkan sebagai dana untuk pembangunan daerah. Menurut Fuadi (2016:97) menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan dana alokasi umum adalah Dana yang berasal dari APBN, yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Menurut Muhammad Idris Patarai (2017:189) menjelaskan dana alokasi umum adalah sebagai berikut: “salah satu transfer dana pemerintah kepada pemerintah daerah yang bersumber dari pendapatan APBN, yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi”.

Berdasarkan teori-teori di atas, dapat disimpulkan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan untuk pemerataan

kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

2.5 Dana Alokasi Khusus

Menurut Halim (2010:16) “Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan membantu mendanai kegiatan khusus yang menjadi urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional”. Pengertian Dana Alokasi Khusus (DAK) menurut Peraturan Pemerintah no. 55/2005, yaitu: Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah- daerah tertentu yang memiliki kebutuhan khusus dengan tujuan membantu mendanai kegiatan-kegiatan khusus yang menjadi urusan daerah sesuai dengan prioritas nasional. Pembiayaan kebutuhan khusus memerlukan dana pendamping dari pendapatan APBD umum minimal 10% (sepuluh persen) sebagai komitmen dan tanggung jawab daerah dalam membiayai program-program yang bersifat kebutuhan khusus. DAK dimaksudkan untuk membantu daerah dalam mendanai kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan publik seperti pendidikan, kesehatan, dan pelayanan prasarana masyarakat dalam rangka mendorong percepatan pembangunan daerah dan pencapaian target prioritas nasional”.

Dana Alokasi Khusus (DAK) menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, yaitu: Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang berasal dari APBN dialokasikan ke daerah untuk membantu membiayai kebutuhan tertentu. Dana Alokasi Khusus

digunakan untuk menutup kesenjangan pelayanan publik antar daerah dengan mengutamakan bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, kelautan dan perikanan, pertanian, infrastruktur pemerintah daerah, dan lingkungan hidup.

Dalam upaya meningkatkan transparansi dan objektivitas dalam pengalokasian Dana Alokasi Umum (DAU) ke setiap provinsi dan kabupaten/kota, proses penghitungan DAU dibagi menjadi:

4. Tahap akademik, tahap ini merupakan tahap persiapan penghitungan alokasi DAU dimana pemerintah, direktorat jenderal perimbangan keuangan, mengundang beberapa perwakilan perguruan tinggi untuk mengevaluasi formula dan perhitungan DAU.
5. Tahap Teknis Tahap ini merupakan tahap penghitungan DAU dari pemerintah
6. Tahap administrasi, tahap ini merupakan hasil penghitungan DAU yang diperoleh pada tahap teknis.
7. Tahap politis, pemerintah dan DPR membahas beberapa alternatif hasil simulasi penghitungan DAU yang dilakukan pemerintah dalam rapat panitia anggaran DPR RI.

Berdasarkan teori-teori di atas, dapat disimpulkan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DAU merupakan Block Grant yaitu hibah yang penggunaannya cukup fleksibel, DAU juga

berfungsi sebagai hibah perimbangan yang menetralsir ketimpangan keuangan akibat adanya dana bagi hasil yang diterima daerah.

2.6 Penelitian Terkait

Penelitian ini dilakukan tidak terlepas dari hasil penelitian-penelitian sebelumnya yang telah dilakukan sebagai bahan perbandingan dan kajian. Hasil penelitian yang dijadikan pembanding tidak lepas dari topik penelitian yaitu “dampak desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi”.

Suciayu & Fahmi Wibawa, (2012). Desentralisasi Fiskal dan Pengaruhnya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal secara bersama-sama mempunyai pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, secara individual Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, memiliki pengaruh yang berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, sedangkan Dana Alokasi Khusus tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.

Dedi tri harito (2012). Dampak desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi daerah di Provinsi Jambi. Analisis dilakukan dengan menggunakan model analisis regresi berganda dengan menggunakan metode GLS dan panel pada tingkat kabupaten-kota di Provinsi Jambi yang meliputi periode enam tahun sebelum desentralisasi fiskal dan sembilan tahun setelah desentralisasi fiskal. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan desentralisasi fiskal pasca 2011 memberikan dampak yang relatif lebih baik

terhadap pertumbuhan ekonomi daerah di Provinsi Jambi dibandingkan periode sebelumnya.

Anita, Mohammad, & Hamzah, (2014) Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Aceh. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Aceh, dan variabel dana alokasi khusus yang memiliki koefisien regresi terbesar, maka dapat disimpulkan bahwa dana alokasi khusus memiliki pengaruh paling besar terhadap pertumbuhan ekonomi di provinsi Aceh.

Rahmah dan Zein (2016) melakukan studi mengenai Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Aceh. Dari hasil penelitian menyatakan bahwa variabel pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan dana bagi hasil berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Aceh.

Mahafir dan Soelistiyo (2017) melakukan studi mengenai Pengaruh PAD, DAU dan DAK terhadap PDRB Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Hasil pengujian menyatakan PAD berpengaruh tidak signifikan dan bersifat negatif terhadap PDRB kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Sedangkan dana alokasi umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB Kabupaten/Kota di provinsi Nusa Tenggara Barat dan dana alokasi khusus berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap PDRB Kabupaten/Kota di provinsi Nusa Tenggara Barat.

Dayana Novita (2018) analisis pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan dana bagi hasil terhadap pertumbuhan ekonomi melalui belanja modal kasus pada 35 kabupaten/kota di provinsi jawa tengah tahun 2012-2016. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah kualitatif dengan menggunakan data PDB atas dasar harga konstan untuk melihat pertumbuhan ekonomi, pendapat asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dana bagi hasil, dan belanja modal di kabupaten/kota. Pengujian dilakukan dengan analisis jalur (*path analysis*). Hasil dari penelitian model pertama menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan dana bagi hasil secara signifikan berpengaruh terhadap belanja modal. Hasil analisis model kedua menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah, dan alokasi khusus, dan belanja modal secara signifikan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, sedangkan dana alokasi umum dan dana bagi hasil tidak signifikan berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi.

Oktafia et al. (2018) melakukan penelitian tentang Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Produk Domestik Regional bruto (PDRB) Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur. Dari hasil penelitian tersebut ditemukan bahwa hasil uji secara simultan menunjukkan bahwa secara keseluruhan variabel PAD, DAU, DAK berpengaruh positif signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur.

Lian Arke, Debby, dan Daisy (2020) pengaruh pendapatan asli daerah (PAD), dana bagi hasil (DBH), dana alokasi umum (DAU) dan dana alokasi khusus (DAK) terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten Minahasa Tenggara Dianalisis secara sendiri-sendiri pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen maupun dianalisis secara bersama-sama. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif yaitu penelitian ilmiah yang sistematis menggunakan data sekunder dari berbagai instansi terkait sedangkan metode analisis menggunakan analisis regresi berganda. Adapun hasil penelitian ini adalah PAD, DBH, DAU dan DAK berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Minahasa Tenggara jika di analisis secara parsial selanjutnya jika di analisis secara simultan maka PAD, DBH, DAU dan DAK berpengaruh positif dan signifikan terhadap perekonomian di minahasa Tenggara.

Rendy (2022) Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana bagi hasil, dana alokasi khusus, belanja barang dan jasa, belanja modal, dana daerah urusan pendidikan terhadap pertumbuhan ekonomi di daerah kabupaten daerah tertinggal di Indonesia. Data penelitian menggunakan data sekunder yang diperoleh dari DJPK Kementerian Keuangan dan BPS. Metode yang digunakan adalah analisis regresi data panel dengan menggunakan data tahun 2015-2019 di 122 Daerah Tertinggal di Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel pendapatan daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, belanja barang dan jasa, serta dana

dinas pendidikan dan pendapatan per kapita berpengaruh positif dan signifikan. Sedangkan variabel belanja modal berpengaruh negatif dan signifikan, dan Dana Bagi Hasil tidak berpengaruh. Hasil regresi menunjukkan nilai adjusted R² sebesar 0,9969 yang berarti bahwa variabel pertumbuhan ekonomi dapat dijelaskan oleh variasi variabel bebas yaitu pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana bagi hasil, dana alokasi khusus, belanja barang dan jasa, belanja modal, dana daerah untuk pendidikan sebesar 99,69 persen. Sedangkan sisanya sebesar 0,31 persen dijelaskan oleh variabel lain di luar model.

2.7 Hubungan antar Variabel

2.7.1 Hubungan antar Dana Bagi Hasil dengan Pertumbuhan Ekonomi

Kajian mengenai pengaruh dana bagi hasil terhadap pertumbuhan ekonomi telah dilakukan oleh sejumlah peneliti. Tetapi, temuan mereka menyajikan informasi yang tidak selaras. Rahmah dan Zein (2016) Dari hasil penelitian menyatakan bahwa variabel pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan dana bagi hasil berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Aceh. Lian Arke, Debby, dan Daisy (2020) pengaruh pendapatan asli daerah (PAD), dana bagi hasil (DBH), dana alokasi umum (DAU) dan dana alokasi khusus (DAK) terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten Minahasa Tenggara dianalisis secara sendiri-sendiri pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen maupun dianalisis secara bersama-sama.

Hasil penelitian ini adalah PAD, DBH, DAU dan DAK berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Minahasa tenggara jika di analisis secara parsial selanjutnya jika di analisis secara simultan maka PAD, DBH, DAU dan DAK berpengaruh positif dan signifikan terhadap perekonomian di minahasa tenggara.

Sedangkan dalam temuan Rendy Alvaro (2022) pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana bagi hasil, dana alokasi khusus, belanja barang dan jasa, belanja modal, dana daerah urusan pendidikan terhadap pertumbuhan ekonomi di daerah kabupaten daerah tertinggal di indonesia. Yang dalam penelitiannya menggunakan metodel *Path Analysis* dalam model kedua dana bagi hasil tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Selaras dengan penelitian di atas Dayana Novita (2018) analisis pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan dana bagi hasil terhadap pertumbuhan ekonomi melalui belanja modal kasus. Pengujian dilakukan dengan analisis jalur (*path analysis*). Hasil dari penelitian model pertama menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan dana bagi hasil secara signifikan berpengaruh terhadap belanja modal. Hasil analisis model kedua menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah, dan alokasi khusus, dan belanja modal secara signifikan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, sedangkan dana alokasi umum dan dana bagi hasil tidak signifikan berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi.

Berdasarkan kajian di atas dapat disimpulkan bahwasannya

dampak dana bagi hasil terhadap pertumbuhan ekonomi masih membingungkan. Disatu sisi mengungkapkan dana bagi hasil berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, dan di sisi lain beberapa peneliti juga ada yang menyatakan bahwa dana bagi hasil tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.

2.7.2 Hubungan antar Dana Alokasi Umum dengan Pertumbuhan Ekonomi

Rahmah dan Zein (2016) melakukan studi mengenai Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Aceh. Dari hasil penelitian menyatakan bahwa variabel pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan dana bagi hasil berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Aceh. Sejalan dengan penelitian diatas Mahafir dan Soelistiyo (2017) melakukan studi mengenai Pengaruh PAD, DAU dan DAK terhadap PDRB Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Hasil pengujian menyatakan dana alokasi umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB Kabupaten/Kota di provinsi Nusa Tenggara Barat.

Berbeda dengan 2 temuan diatas Dayana Novita (2018) analisis pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan dana bagi hasil terhadap pertumbuhan ekonomi melalui belanja modal kasus. Pengujian dilakukan dengan analisis jalur (*path analysis*). Hasil dari penelitian model pertama menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan dana bagi hasil secara signifikan

berpengaruh terhadap belanja modal. Hasil analisis model kedua menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah, dan alokasi khusus, dan belanja modal secara signifikan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, sedangkan dana alokasi umum dan dana bagi hasil tidak signifikan berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi.

Berdasarkan kajian di atas dapat disimpulkan bahwasannya dampak dana alokasi umum terhadap pertumbuhan ekonomi masih membingungkan. Disatu sisi mengungkapkan dana alokasi umum berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, dan di sisi lain ada yang menyatakan bahwa dana alokasi umum tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.

2.7.3 Hubungan antar Dana Alokasi Khusus dengan Pertumbuhan Ekonomi

Rendy Alvaro (2022) Penelitian menganalisis pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana bagi hasil, dana alokasi khusus, belanja barang dan jasa, belanja modal, dana daerah urusan pendidikan terhadap pertumbuhan ekonomi di daerah kabupaten daerah tertinggal di Indonesia. Data penelitian menggunakan data sekunder yang diperoleh dari DJPK Kementerian Keuangan dan BPS. Metode yang digunakan adalah analisis regresi data panel dengan menggunakan data tahun 2015-2019 di 122 Daerah Tertinggal di Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel pendapatan daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, belanja barang dan jasa, serta dana dinas pendidikan dan pendapatan per kapita berpengaruh positif dan signifikan. Hasil

regresi menunjukkan nilai adjusted R2 sebesar 0,9969 yang berarti bahwa variabel pertumbuhan ekonomi dapat dijelaskan oleh variasi variabel bebas yaitu pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana bagi hasil, dana alokasi khusus, belanja barang dan jasa, belanja modal, dana daerah untuk pendidikan sebesar 99,69 persen. Sedangkan sisanya sebesar 0,31 persen dijelaskan oleh variabel lain di luar model.

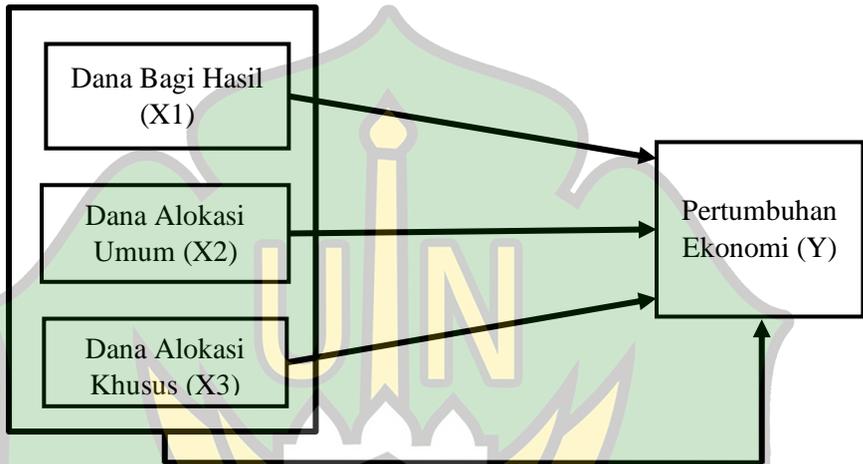
Penelitian ini sejalan dengan Dayana Novita (2018) analisis pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan dana bagi hasil terhadap pertumbuhan ekonomi melalui belanja modal kasus pada 35 kabupaten/kota di provinsi Jawa Tengah tahun 2012-2016. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah kualitatif dengan menggunakan data PDB atas dasar harga konstan untuk melihat pertumbuhan ekonomi, pendapat asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dana bagi hasil, dan belanja modal di kabupaten/kota. Pengujian dilakukan dengan analisis jalur (*path analysis*). Hasil dari penelitian model pertama menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan dana bagi hasil secara signifikan berpengaruh terhadap belanja modal. Hasil analisis model kedua menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah, dan alokasi khusus, dan belanja modal secara signifikan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi.

Berdasarkan temuan penelitian yang telah dijelaskan di atas, dapat kita simpulkan bahwa dana alokasi khusus terhadap pertumbuhan ekonomi berdampak signifikan.

2.8 Kerangka Berpikir

Adapun skema kerangka berpikir penelitian ini ditampilkan pada Gambar 2.1

Gambar 2. 1
Skema Kerangka Berpikir



Sumber: Data diolah (2021)

2.9 Hipotesis Penelitian

Mengingat latar belakang, penemuan penelitian terkait dan sistem eksplorasi digambarkan sebelumnya, hipotesis penelitian adalah:

- H1 Pengaruh Dana bagi hasil terhadap pertumbuhan Ekonomi.
- H2 Pengaruh Dana alokasi umum terhadap pertumbuhan Ekonomi.
- H3 Pengaruh Dana alokasi khusus terhadap pertumbuhan Ekonomi.
- H4 Pengaruh Dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus terhadap pertumbuhan Ekonomi.

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif, metode kuantitatif adalah metode penyajian data yang didominasi angka-angka dan analisis data yang digunakan bersifat statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis.

Dilihat dari sifatnya, penelitian ini adalah penelitian deskriptif analisis, karena dalam penelitian ini menggambarkan pengaruh dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan dana bagi hasil terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Banda Aceh yang menyajikan data, menganalisis dan menginterpretasikannya.

Deskriptif adalah penelitian yang diarahkan untuk memberikan gejala, fakta, atau peristiwa secara sistematis dan akurat, mengenai ciri-ciri populasi atau wilayah tertentu. Berkaitan dengan penelitian ini, akan diuraikan tentang hal-hal yang berkaitan dengan pengaruh desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Banda Aceh dalam Perspektif Ekonomi Islam.

3.2 Sumber Data

3.2.1 Data Sekunder

Dalam upaya mencari kebenaran, penelitian ini menggunakan data kuantitatif. Data kuantitatif adalah data yang penyajiannya berupa angka-angka yang sekilas lebih mudah diketahui atau dibandingkan satu sama lain. Data kuantitatif dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis dampak desentralisasi fiskal terhadap

pertumbuhan ekonomi di Kota Banda Aceh dalam perspektif ekonomi syariah.

Data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diterbitkan atau digunakan oleh organisasi yang bukan pengolah. Dalam penelitian ini penulis memperoleh data sekunder dengan mengutip literatur dari buku-buku yang berhubungan dengan data penelitian dari instansi pemerintah yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Kota Banda Aceh.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Dalam usaha menghimpun data dilokasi penelitian, penulis menggunakan beberapa metode, yaitu:

3.3.1 Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data tentang hal-hal atau variabel berupa catatan, transkrip, dan buku, surat kabar, majalah juga dapat berupa file yang disimpan di server dan data yang disimpan di website. Data ini tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Penulis menggunakan metode ini untuk mendapatkan data resmi yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik.

3.3.2 Studi Pustaka

Studi literatur dilakukan dengan cara mempelajari dan mengambil data dari literatur terkait dan sumber lain seperti buku, catatan dan laporan hasil penelitian sebelumnya yang dianggap dapat memberikan informasi tentang penelitian ini.

3.4 Populasi dan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari: objek/subyek yang memiliki kualitas dan karakteristik tertentu yang ditentukan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Populasi yang diambil dalam penelitian ini adalah penjumlahan seluruh data laporan dana bagi hasil, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus di Kota Banda Aceh.

3.5 Operasional Variabel

Definisi operasional adalah variabel penelitian yang dimaksudkan untuk memahami arti dari setiap variabel penelitian sebelum analisis, instrumen, dan sumber pengukuran berasal. Definisi operasional variabel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Dana bagi hasil adalah dana yang bersumber dari APBN berupa pajak dan sumber daya alam yang disalurkan ke daerah berdasarkan angka persentase tertentu dengan memperhatikan potensi daerah penghasil. Dana alokasi umum adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan daerah dalam rangkapelaksanaan desentralisasi. Dana alokasi umum adalah transfer antar tingkat pemerintahan yang tidak terkait dengan program pengeluaran tertentu

Dana alokasi khusus adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk membantu kebutuhan tertentu.

Tabel 3. 1
Definisi Operasional Variabel

Variabel	Definisi	Skala Pengukuran
Dana Bagi Hasil (X1)	Dana bagi hasil adalah sebagai berikut: “dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.” (Toman Sony Tambunan, 2019:91).	Rupiah (Rp)
Dana Alokasi Umum (X2)	Dana Alokasi Umum (DAU) adalah “Dana yang bersumber dari penerimaan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka konteks pelaksanaan desentralisasi.” (Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah).	Rupiah (Rp)
Dana Alokasi Khusus (X3)	“Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan membantu mendanai kegiatan khusus yang menjadi urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.” (Halim, 2010:16).	Rupiah (Rp)
Pertumbuhan Ekonomi (Y)	Sebuah pertumbuhan produksi atau hasil yang terus menerus dengan cara yang benar yang dapat memberikan kontribusi bagi kesejahteraan umat manusia. (A. H. M Shadeq, 1989:24)	Persen (%)

Sumber: Data diolah (2021)

3.6 Teknik Pengolahan Dan Analisis Data

Setelah data terkumpul, penulis kemudian menganalisis data tersebut sehingga dapat ditarik kesimpulan. Dalam menganalisis hal tersebut, penulis menggunakan metode berpikir deduktif, yaitu dimulai dari fakta-fakta umum, peristiwa-peristiwa konkrit, kemudian fakta-fakta umum dan konkret dan peristiwa-peristiwa yang ditarik dari generalisasi-generalisasi yang memiliki ciri-ciri khusus.

Metode analisis yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kuantitatif dengan penelitian studi kasus yang digunakan untuk mengumpulkan, mengelola, dan kemudian menyajikan data pengamatan sehingga pihak lain dapat dengan mudah mendapatkan gambaran tentang objek penelitian. Deskriptif kuantitatif dilakukan untuk menjawab pertanyaan penelitian, yaitu menganalisis pengaruh antar variabel.

Alat uji analisis data menggunakan analisis regresi berganda, yaitu tentang analisis bentuk dan tingkat hubungan antara satu variabel terikat dengan lebih dari satu variabel bebas. Untuk keabsahan data digunakan uji asumsi klasik dan uji hipotesis.

3.7 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y), sehingga peneliti menggunakan analisis regresi untuk membandingkan dua variabel yang berbeda. Dalam analisis regresi untuk mendapatkan

model regresi yang andal, asumsi-asumsi berikut harus dipenuhi. Ada empat pengujian dalam uji asumsi klasik, yaitu:

3.8.1 Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui sebaran data pada variabel-variabel yang akan digunakan dalam penelitian dan sebaliknya sebelum data diolah berdasarkan model penelitian. Metode yang tepat dan baik yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Kolmogorov-Smirnov, yaitu uji beda antara data yang diuji normalitasnya dengan data normal standar. Dengan pengambilan keputusan:

- a. Jika $Sig > 0,05$ maka data berdistribusi normal
- b. Jika $Sig < 0,05$ maka data tidak berdistribusi normal

3.8.2 Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas dimaksudkan untuk menguji apakah model regresi menemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Jika terdapat korelasi antar variabel bebas, maka terdapat masalah multikolonieritas (multiko) dalam model regresi. deteksi multikolinearitas:

- a. Besaran VIF (Variance Inflation Factor) dan Tolerance Model regresi yang bebas multikolinearitas adalah:
- b. Mempengaruhi nilai VIF disekitar angka 1 b. Mempunyai angka tolerance mendekati 1
- c. Besaran korelasi antara variabel independen Pedoman suatu model regresi yang bebas multikolinearitas adalah koefisien

korelasi antar variabel independen haruslah lemah dibawah 0,05. Jika korelasi kuat maka terjadi problem multikolinearitas

3.8.3 Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linier terdapat korelasi antara variabel pengganggu pada periode tertentu dengan variabel sebelumnya. Jika ada korelasi, itu disebut masalah autokorelasi. Autokorelasi muncul karena pengamatan berturut-turut dari waktu ke waktu terkait satu sama lain. Untuk mengetahui ada tidaknya autokorelasi dalam suatu penelitian menggunakan uji Durbin-Watson.

Uji Durbin-Watson hanya digunakan untuk autokorelasi level satu (First Order Autocorrelation) dan membutuhkan adanya titik potong (konstanta) dalam model regresi dan tidak adanya variabel lain di antara variabel bebas. Hipotesis yang diuji adalah:

H_0 : tidak ada autokorelasi ($r=0$) H_a : tidak ada autokorelasi ($r \neq 0$).

3.8.4 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas ditujukan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidak samaan variance dan residual suatu periode pengamatan ke periode pengamatan yang lain. Jika variance dari residual suatu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah homoskedastisitas atau tidak terdapat heteroskedastisitas dalam model yang dapat dilihat pada gambar scatterplot. Analisis dasar

heteroskedastisitas melalui grafik plot adalah sebagai berikut:

- a. Jika terdapat pola tertentu, seperti titik-titik yang membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar hingga menyempit) maka menunjukkan telah terjadi heteroskedastisitas.
- b. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan dibawahnya pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

3.8 Pengujian Hipotesis

3.9.2 Koefisien determinasi (R^2)

Koefisien determinasi atau R^2 dari hasil regresi berganda menunjukkan seberapa besar variabel terikat dapat dijelaskan oleh variabel bebas. Dalam penelitian ini menggunakan regresi linier berganda dengan menggunakan masing-masing independen yaitu dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dana bagi hasil secara parsial dan simultan mempengaruhi variabel dependen yaitu profitabilitas yang dinyatakan dengan R^2 untuk menyatakan koefisien determinasi atau seberapa besar pengaruhnya terhadap variabel dependen. variabel dana alokasi umum memiliki, dana alokasi khusus, dana bagi hasil terhadap pertumbuhan ekonomi. Sedangkan R^2 untuk menyatakan koefisien determinasi parsial variabel bebas terhadap variabel terikat

Besarnya koefisien determinasi adalah 0-1, semakin mendekati 0, semakin kecil pengaruh semua variabel independen

terhadap nilai variabel dependen, (dengan kata lain semakin kecil kemampuan model untuk menjelaskan perubahan nilai variabel terikat). Sedangkan jika koefisien determinasinya mendekati 1, maka dapat dikatakan bahwa model tersebut semakin kuat dalam menjelaskan variasi dari variabel-variabel yang terkait. Angka-angka dari R square diperoleh dari pengolahan data melalui program SPSS yang dapat dilihat pada tabel ringkasan model kolom R square.

3.9.3 Uji f Atau Uji Simultan

Uji f ini digunakan untuk menguji apakah variabel bebas (X_1 , X_2 , X_3) secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat dari suatu persamaan regresi dengan menggunakan hipotesis statistik. Pengambilan keputusan didasarkan pada nilai probabilitas yang diperoleh dari hasil pengolahan data melalui program parametrik statistik SPSS sebagai berikut:

- a. Jika probabilitas $< 0,05$ maka H_0 ditolak
- b. Jika probabilitas $> 0,05$ maka H_0 diterima

3.9.4 Uji t Uji Parsial

Uji t-statistik digunakan untuk menguji pengaruh variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen yaitu pengaruh masing-masing variabel independen yang terdiri dari pengaruh dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dana bagi hasil terhadap PDRB yang menjadi dependen variabel. Seperti halnya dengan pengujian hipotesissimultan, pengambilan keputusan untuk pengujian hipotesis parsial juga didasarkan pada nilai probabilitas

yang diperoleh dari hasil pengolahan data melalui program parametrik statistik SPSS sebagai berikut:

- a. Jika probabilitas > 0,05 maka H_0 di terima
- b. Jika probabilitas < 0,05 maka H_0 ditolak

Pada uji t, nilai probabilitas dapat dilihat pada hasil pengolahan program SPSS pada tabel koefisien kolom sig atau Significance.

3.9.5 Analisis Regresi Linear Berganda

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis linier berganda. Regresi linier berganda untuk memprediksi pengaruh dua variabel atau lebih pada satu variabel atau untuk membuktikan ada tidaknya hubungan fungsional antara dua variabel bebas (X) atau lebih dengan variabel terikat (Y).

Dimana:

$$Y = a + b_1x_1 + b_2x_2 + b_3x_3 + e$$

Keterangan:

- Y : Pertumbuhan Ekonomi
a : Bilangan Konstanta
B1-B2 : Koefisien Regresi
X1 : Dana Bagi Hasil
X2 : Dana Alokasi Umum
X3 : Dana Alokasi Khusus
e : Standar eror

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum dan Objek Penelitian

4.1.1 Gambaran Umum

Kota Banda Aceh secara astronomis terletak antara $05^{\circ}16'15''$ - $05^{\circ}36'16''$ Lintang Utara dan $95^{\circ}16'15''$ - $95^{\circ}22'35''$ Bujur Timur dan memiliki luas wilayah 61,36 km². Kota Banda Aceh memiliki batas wilayah yang meliputi, di sebelah utara berbatasan dengan Selat Malaka, di sebelah selatan dengan Kabupaten Aceh Besar, di sebelah barat dengan Samudera Hindia, di sebelah timur dengan Kabupaten Aceh Besar.

Kota Banda Aceh merupakan dataran rawan banjir dari luapan Sungai Krueng Aceh dan 70% wilayahnya berada pada ketinggian kurang dari 10 meter di atas permukaan laut. Ke arah hulu dataran ini menyempit dan bergelombang dengan ketinggian mencapai 50 m di atas permukaan laut. Dataran ini diapit oleh perbukitan terjal di sebelah barat dan timur dengan ketinggian lebih dari 500 m, sehingga tampak seperti kerucut dengan mulut menghadap ke laut. Wilayah pesisir Kota Banda Aceh secara garis besar terbagi menjadi:

1. Dataran terdapat di pesisir pantai utara dari Kecamatan Kuta Alam hingga sebagian Kecamatan Kuta Raja
2. Pesisir pantai wilayah barat di sebagian Kecamatan Meuraxa.

Kondisi tanah yang umumnya terdapat di Kota Banda Aceh pada umumnya dan khususnya di wilayah pesisir didominasi oleh

jenis tanah Podsolik Merah Kuning (PMK) dan Regosol dengan tekstur tanah mulai dari sedang sampai kasar.

Kepadatan penduduk Kota Banda Aceh adalah 4,154 jiwa/km². Laju pertumbuhan penduduk Kota Banda Aceh cukup fluktuatif dalam kurun waktu 2010-2019 dengan rata-rata 2,67% per tahun. Konsentrasi kepadatan penduduk tertinggi terdapat di Kecamatan Kuta Alam dengan jumlah penduduk 50,618 jiwa atau 15% dari total penduduk Kota Banda Aceh. Dalam RPJMN 2015-2019, Kota Banda Aceh diarahkan sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) sebagai pusat pengumpulan dan distribusi skala regional untuk produksi pertanian, pariwisata, dan perikanan laut. Kota Banda Aceh juga termasuk dalam Kawasan Strategis Nasional KAPET Banda Aceh Darussalam. Potensi wisata di Kota Banda Aceh terdiri dari potensi wisata alam, wisata sejarah bencana tsunami, wisata spiritual, serta wisata sejarah dan arkeologi.

4.1.2 Sejarah Kota Banda Aceh

Banda Aceh dikenal tua yang erat kaitannya dengan sejarah kejayaan Kerajaan Aceh Darussalam. Pada masa kesultanan, Banda Aceh dikenal dengan nama Bandar Aceh Darussalam. Kota ini dibangun oleh Sultan Johan Syah pada hari Jumat, 1 Ramadhan 601 H (22 April 1205 M). Saat ini Banda Aceh telah berusia 813 tahun. Banda Aceh adalah salah satu kota Islam tertua di Asia Tenggara. Kota Banda Aceh juga berperan penting dalam penyebaran agama Islam ke seluruh Nusantara/Indonesia. Oleh karena itu, kota ini juga dikenal sebagai Serambi Mekah.

Pada masa kejayaannya, Bandar Aceh Darussalam dikenal sebagai kota besar daerah yang juga dikenal sebagai pusat pendidikan Islam. Oleh karena itu, kota ini banyak dikunjungi oleh pelajar dari Timur Tengah, India dan Negara lainnya. Bandar Aceh Darussalam juga merupakan pusat perdagangan yang dikunjungi oleh para pedagang dari seluruh dunia termasuk dari Arab, Turki, Cina, Eropa, dan India. Kerajaan Aceh mencapai puncak kejayaannya ketika dipimpin oleh Sultan Iskandar Muda (1607-1636), seorang tokoh legendaris dalam sejarah Aceh.

Banyak dari pelajar dan pedagang pendatang ini akhirnya menetap di Aceh dan menikah dengan perempuan lokal. Hal ini menyebabkan terjadinya percampuran budaya. Hingga kini, budaya masih menyisakan pemandangan di sudut-sudut kota Banda Aceh. Misalnya di Budaya Pecinan di Desa Peunayong dan sisa-sisa makam Turki di Desa Bitai.

4.1.3 Sektor Ekonomi Kota Banda Aceh

Perkembangan PDRB Kota Banda Aceh secara riil dilihat berdasarkan PDRB atas dasar harga konstan (ADHK) tahun dasar 2010. Nilai PDRB ADHK Kota Banda Aceh tahun 2015 telah mencapai 57,91%, meningkat dari tahun 2010. Nilai PDRB ADHK Kota Banda Aceh selama 4 tahun terakhir mengalami peningkatan rata-rata sebesar 2% per tahun. Peningkatan nilai PDRB ADHB selama 4 tahun terakhir telah terlihat peningkatan 1,8 kali lipat PDRB ADHK. Hal ini menunjukkan bahwa kenaikan yang disebabkan oleh harga mempunyai pengaruh yang hampir sama

dengan kenaikan akibat kenaikan produksi.

Kondisi perekonomian Kota Banda Aceh dilihat dari pertumbuhan ekonominya terus meningkat dari waktu ke waktu. Jika mengacu pada PDRB tahun dasar 2010, rata-rata pertumbuhan ekonomi Banda Aceh selama 10 tahun terakhir adalah 4,01 persen. Pada tahun 2010 dan 4,18 pada tahun 2019, laju pertumbuhan ekonomi Kota Banda Aceh mencapai 5,01 persen yang menunjukkan akselerasi yang lebih baik dari tahun 2010.

Dari sisi pengeluaran, penyumbang terbesar pertumbuhan ekonomi Kota Banda Aceh berasal dari komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB). Kontribusi tersebut berasal dari konstruksi PMTB, sejalan dengan kontribusi besar kategori konstruksi dari segi lapangan usaha. Pada tahun 2015, komponen PMTB memberikan kontribusi sebesar 4,47 poin terhadap laju pertumbuhan Kota Banda Aceh.

4.2 Hasil Penelitian

Penelitian ini menganalisis pengaruh Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kota Banda Aceh. Data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data Times Series atau rentang waktu dari tahun 2010 sampai dengan 2019. Alat pengolah data yang digunakan dalam penelitian ini adalah software komputer SPSS.17 dengan metode analisis regresi linier berganda. Oleh karena itu perlu dilihat bagaimana gambaran perkembangan umum pertumbuhan ekonomi (PDRB ADHK), Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dana

Alokasi Khusus Kota Banda Aceh dari tahun ke tahun.

4.2.1. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah suatu ukuran yang menggambarkan perkembangan suatu perekonomian pada suatu tahun tertentu jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Salah satu indikator untuk menilai keberhasilan pembangunan suatu daerah adalah pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Pertumbuhan ekonomi diharapkan dapat meningkatkan kapasitas faktor produksi yang mendorong pembangunan ekonomi daerah dalam skala yang lebih besar.

Dalam pembahasan ini akan dicatat seberapa besar pertumbuhan ekonomi Kota Banda Aceh dari tahun 2010-2019 dimana data yang digunakan untuk melihat pertumbuhan ekonomi adalah data PDRB atas dasar harga konstan. Perkembangan PDRB kota Banda Aceh selama tahun 2010 hingga 2019 terus mengalami perubahan dari tahun ke tahun. Perkembangan PDRB Banda Aceh dari tahun 2010-2019 secara umum dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4. 1
Produk Domestik Regional Bruto Kota Banda Aceh Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha

Tahun	PDRB Atas Dasar Harga Konstan
2010	Rp 10.062.081.42
2011	Rp 10.518.849.16

Tabel 4.1 Lanjutan	
Tahun	PDRB Atas Dasar Harga Konstan
2012	Rp 11.079.680.15
2013	Rp 11.597.228.47
2014	Rp 12.118.527.34
2015	Rp 12.724.949.07
2016	Rp 13.480.109.89
2017	Rp 13.937.101.46
2018	Rp 14.556.917.28
2019	Rp 15.157.978.10

Sumber: Badan Pusat Statistik tahun 2010-2019 (data diolah)

Dari Tabel 4.1 di atas terlihat bahwa produk domestik regional bruto dari tahun 2010 hingga tahun 2019 mengalami peningkatan, peningkatan yang sangat signifikan terjadi pada tahun 2016. Setiap tahun menunjukkan arah yang positif selama 10 tahun terakhir, hal ini memberikan indikasi besarnya pengaruh Ekonomi Kota Banda Aceh terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Banda Aceh.

4.2.2. Dana Bagi Hasil

Adalah dana yang bersumber dari APBN berupa pajak dan sumber daya alam, yang didistribusikan ke daerah-daerah berdasarkan angka persentase tertentu dengan memperhatikan potensi daerah penghasil. Dana bagi hasil terdiri dari dana bagi hasil yang bersumber dari pajak dan dana bagi hasil sumber daya alam. Perkembangan dana bagi hasil Kota Banda Aceh selama periode 2010 sampai dengan 2019 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 4. 2
Realisasi Dana Bagi Hasil Tahun 2010-19

NO	Tahun	Dana Bagi Hasil (pajak + non pajak)
1	2010	Rp 56.390.722.335
2	2011	Rp 44.782.694.482
3	2012	Rp 41.925.074.867
4	2013	Rp 33.101.195.105
5	2010	Rp 36.564.945.848
6	2015	Rp 25.039.648.050
7	2016	Rp 30.872.881.469
8	2017	Rp 40.255.959.285
9	2018	Rp 40.072.750.406
10	2019	Rp 36.187.097.917

Sumber: Badan Pusat Statistik tahun 2010-2019 (data diolah)

Dari Tabel 4.2 di atas terlihat bahwa jumlah dana bagi hasil selama sepuluh tahun terakhir mengalami pasang surut. Penurunan dana bagi hasil terendah pada tahun 2010 adalah Rp 56.390.722.335 tetapi pada tahun-tahun berikutnya meningkat lagi, pada tahun 2017-2019 kembali menurun.

4.2.3. Dana Alokasi Umum

Dana alokasi umum merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Dana alokasi umum untuk suatu daerah ditetapkan berdasarkan kriteria tertentu yang menekankan pada aspek pemerataan dan keadilan yang selaras dengan penyelenggaraan urusan pemerintah yang formula dan perhitungan dana alokasi

umumnya ditetapkan sesuai undang-undang. Adapun perkembangan dana alokasi umum Kota Banda Aceh selama periode tahun 2010 sampai dengan 2019 dapat di lihat pada Tabel 4.3 sebagai berikut:

Tabel 4. 3
Realisasi Dana Alokasi Umum Tahun 2010-2019

NO	Tahun	Dana Alokasi umum
1	2010	Rp 328.073.282.000
2	2011	Rp 406.480.305.000
3	2012	Rp 491.593.554.000
4	2013	Rp 567.628.828.000
5	2014	Rp 610.554.730.000
6	2015	Rp 612.503.568.000
7	2016	Rp 602.292.108.000
8	2017	Rp 591.711.772.000
9	2018	Rp 591.711.772.000
10	2019	Rp 605.014.830.000

Sumber: Badan Pusat Statistik tahun 2010-2019 (data diolah)

Dari Table 4.3 di atas dapat diketahui bahwa dana alokasi umum di Kota Banda Aceh setiap tahunnya mengalami peningkatan, akan tetapi pada tahun 2019 dana alokasi umum mengalami penurunan yang sangat besar. Jika pada tahun 2018 dana alokasi umum sebesar Rp 591,711,772,000 maka pada tahun 2019 sebesar Rp 605,014,830,000.

4.2.4. Dana Alokasi Khusus

Dana alokasi khusus adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan

daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Kegiatan khusus yang dimaksud adalah kegiatan dengan kebutuhan yang tidak dapat diperkirakan dengan rumus alokasi umum.

Dalam pengertian kebutuhan suatu daerah tidak sama dengan kebutuhan daerah lain, penentuan daerah tertentu harus memenuhi kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis. Adapun perkembangan dana alokasi khusus Kota Banda Aceh selama periode tahun 2010-2019 sebagai berikut:

Tabel 4. 4
Realisasi Dana Alokasi Khusus Tahun 2010-19

NO	Tahun	Dana Alokasi Khusus
1	2010	Rp 21.351.600.000
2	2011	Rp 29.636.400.000
3	2012	Rp 26.893.570.000
4	2013	Rp 31.003.110.000
5	2014	Rp 38.833.120.000
6	2015	Rp 42.758.540.000
7	2016	Rp 168.636.091.947
8	2017	Rp 105.782.661.134
9	2018	Rp 116.595.706.007
10	2019	Rp 111.593.861.259

Sumber: Badan Pusat Statistik tahun 2010-2019 (data diolah)

Dari Tabel 4.4 di atas dapat dilihat dana alokasi khusus dari tahun 2010-2019 mengalami kenaikan yang sangat signifikan di tahun 2016 seterusnya sebesar Rp 168,636,091,947 pada tahun 2017 dan pada tahun berikutnya mengalami penurunan pada tahun 2019 penurunannya tidak terlalu jauh.

4.3 Asumsi Klasik

4.3.1. Uji Normalitas

Uji Normalitas bertujuan untuk mengetahui distribusi data dalam variabel yang akan digunakan dalam penelitian dan sebaliknya digunakan sebelum data diolah berdasarkan model-model penelitian. Metode yang layak dan baik digunakan dalam penelitian ini adalah metode Kolmogorov-Smirnov. Uji beda antara data yang diuji normalitasnya dengan data normal baku.

Dengan pengambilan keputusan: Jika $Sig > 0,05$ maka data berdistribusi normal, Jika $Sig < 0,05$ maka data tidak berdistribusi normal. Ada yang sering digunakan untuk menguji normalitas residual, yaitu analisis grafik (normal p-p plot) regresi dan uji one sample Kolmogorov-Smirnov.

Tabel 4. 5
Hasil Uji Normalitas One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		Unstandardized Residual
N		10
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	288.94565720
Most Extreme Differences	Absolute	.118
	Positive	.118
	Negative	-.093
Test Statistic		.118
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.

Sumber: Data diolah 2023

Hasil uji normalitas di atas dapat dilihat pada Tabel 4.5 bahwa nilai signifikansi (Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,200 karena signifikansi lebih dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa nilai residual terdistribusi dengan normal.

4.3.2. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas digunakan untuk melihat terdapat gangguan atau tidak terhadap data dimasa multikolinieritas terjadi apabila ada korelasi antara variabel independen dengan demikian uji ini dilakukan agar data yang ada harus terbebas dari gangguan multikolinieritas. Pengujian dalam uji multikolinieritas dengan melihat nilai VIF (variance inflation factor) harus ada dibawah 10 maka dapat dikatakan tidak terjadi multikolinieritas. Hal ini akan dijelaskan pada Tabel 4.6

Tabel 4. 6
Hasil Uji Multikolinieritas
Coefficients^a

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	X1	.234	4.271
	X2	.181	5.513
	X3	.604	1.655

a. Dependent Variable: Y

Sumber: Data diolah 2023

Berdasarkan hasil uji multikolinieritas pada Tabel 4.6 menunjukkan bahwa data yang tidak terjadi gejala multikolinieritas antara masing- masing variabel independen dalam model regresi yaitu melihat nilai VIF dan nilai tolerance. Hasil perhitungan tolerance menunjukkan tidak ada variabel independen yang memiliki nilai tolerance kurang dari 0,10 yang berarti tidak ada

korelasi antar variable independen yang nilainya lebih dari 95%. Hasil perhitungan Variance Inflation Factors (VIF) juga menunjukkan hal yang sama tidak ada satu variabel independen yang memiliki nilai VIF lebih dari 10.

4.3.3. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi digunakan untuk melihat korelasi antara sesama variabel bebas yang diurutkan waktu dan ruang. Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Jika terjadi korelasi maka dinamakan ada problem autokorelasi. Untuk mendeteksi autokorelasi dalam penelitian ini maka digunakan uji Durbin Watson (DW).

Tabel 4. 7
Hasil Uji Autokorelasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.940 ^a	.883	.825	353.885	2.183

a. Predictors: (Constant), X3, X1, X2

b. Dependent Variable: Y

Sumber: Data diolah 2023

Pada Tabel 4.7 di atas dapat diketahui nilai Durbin Watson (d) sebesar 2,183 nilai ini akan dibandingkan dengan nilai tabel yang menggunakan signifikansi sebesar 5 %. Jumlah sampel (n) 10 dan jumlah variabel independen (k) adalah 3. Maka dari tabel di atas dapat nilai $d_u = 2,0163$ dan nilai $d_l = 0,5253$ oleh karena nilai $d_u < d_w < 3 - d_u$ atau $2,0163 < 2,183 < 0,9837$ maka dapat disimpulkan tidak ada autokorelasi.

4.3.4. Analisis Regresi Linier Berganda

Model pengujian regresi berganda merupakan model regresi yang memiliki lebih dari satu variabel independen. Dalam penelitian ini analisis regresi berganda bertujuan untuk melihat pengaruh antara DAU, DAK, DBH, terhadap pertumbuhan ekonomi. Adapun hasil yang ditunjukkan dari uji regresi berganda pada variabel-variabel dalam penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 4.8 berikut:

Tabel 4. 8
Ringkasan Uji Regresi Linier Berganda

		Coefficients ^a			
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	
Model		B	Std. Error	Beta	t
1	(Constant)	656.020	2422.631		.271
	X1	.027	.029	.272	.943
	X2	.006	.003	.746	2.279
	X3	.007	.003	.515	2.871
					Sig.
					.796
					.382
					.063
					.028

a. Dependent Variable: Y
Sumber: Data diolah 2023

$$Y = a + b_1x_1 + b_2x_2 + b_3x_3 + e$$

$$Y = 656.020 + 0,027 X_1 + 0,006 X_2 + 0,007 X_3 + e$$

Koefisien – koefisien persamaan regresi linear berganda di atas dapat diartikan sebagai berikut:

- Nilai konstanta pada persamaan regresi sebesar 656.020 menunjukkan bahwa jika variabel independen lainnya bernilai nol, maka variabel pertumbuhan ekonomi akan mengalami peningkatan sebesar 656.020 satuan.
- Koefisien regresi variabel dana bagi hasil sebesar 0,027

menunjukkan bahwa jika variable dana bagi hasil meningkat satu satuan maka variabel pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan sebesar 0,027 satuan dengan ketentuan variabel lainnya konstan

- c. Koefisien regresi variabel dana alokasi umum sebesar 0,006 menunjukkan bahwa jika variabel dana alokasi umum meningkat satu satuan maka variabel pertumbuhan ekonomi akan meningkat sebesar 0,006 satuan
- d. Koefisien regresi variable dana alokasi khusus sebesar 0,007 menunjukkan bahwa jika variabel dana alokasi khusus meningkat satu satuan maka variabel pertumbuhan ekonomi akan mengalami ppeningkatan sebesar 0,007 satuan dengan ketentuan variabel lainnya secara konstan.
- e.

4.4 Uji Hipotesis

4.4.1 Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) pada dasarnya adalah untuk mengukur seberapa jauh kemampuan suatu model dalam menerangkan variasi dari variabel independen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati angka satu berarti variabel-variabel dependen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen.

Tabel 4.9
Hasil Koefisien Determinasi (R^2)
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.940 ^a	.883	.825	353.885	2.183

a. Predictors: (Constant), X3, X1, X2

b. Dependent Variable: Y

Sumber: Data diolah 2023

Model koefisien determinasi memiliki kelemahan yakni bias terhadap jumlah variabel independen yang dimasukkan kedalam model. Dalam penelitian ini menggunakan nilai dari Adjusted R^2 untuk mengevaluasi mana model regresi terbaik. Berdasarkan hasil perhitungan uji koefisien determinasi atau Adjusted R^2 diperoleh nilai sebesar 0,825 yang artinya adalah besarnya pengaruh yang ditimbulkan oleh variabel bebas dalam hal ini menjelaskan variabel pertumbuhan ekonomi sebesar 82,5% sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimaksud dalam penelitian ini.

4.4.2 Uji Parsial (Uji t)

Uji statistik t pada dasarnya digunakan untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh variabel independen secara individual dapat mempengaruhi variasi variabel dependen. Dalam penelitian ini uji hipotesis digunakan untuk mengetahui adanya masing-masing pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen yang dalam penelitian ini adalah pengaruh Dana Bagi Hasil, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus terhadap pertumbuhan ekonomi.

Ketentuan yang digunakan dalam uji statistik t adalah jika nilai signifikansi sebesar $\alpha = 0,05$ (5%), maka H_0 dapat ditolak

dengan demikian H_a dapat diterima. Dapat dikatakan bahwa terdapat pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial. Berikut hasil uji t pada variabel - variabel independen terhadap variabel dependen:

Tabel 4. 9
Hasil Uji Parsial (Uji t)
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	656.020	2422.631		.271	.796
X1	.027	.029	.272	.943	.382
X2	.006	.003	.746	2.279	.063
X3	.007	.003	.515	2.871	.028

a. Dependent Variable: Y
Sumber: Data diolah dengan SPSS (2023)

Berdasarkan pengujian regresi secara parsial pada Tabel 4.9 di atas menunjukkan bahwa:

1. Variabel Dana Bagi Hasil tidak pengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kota Banda Aceh. Variabel Dana Bagi Hasil dengan nilai signifikan lebih besar dari alpa 0,05 % ($0,382 > 0,05$).
2. Variabel Dana Alokasi Umum tidak berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kota Banda Aceh. Variabel Dana Alokasi Umum dengan nilai signifikan lebih besar dari alpa 0,05 ($0,063 > 0,05$).
3. Variabel Dana Alokasi Khusus berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kota Banda Aceh. Variabel Dana Alokasi Khusus dengan nilai signifikan lebih kecil dari alpa 0,05

(0,028<0,05).

4.4.3 Uji Simultan (Uji F)

Uji F bertujuan untuk menguji pengaruh variabel independen yang terdiri dari Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus terhadap pertumbuhan Ekonomi di Kota Banda Aceh secara bersama-sama. Untuk mengetahui signifikan atau tidak pengaruh secara bersama-sama variabel bebas terhadap variabel terikat maka digunakan probability sebesar 5% ($=0,05$).

Tabel 4. 10
Hasil Uji (Uji F)
ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	5689167.265	3	1896389.088	15.143	.003 ^b
	Residual	751406.335	6	125234.389		
	Total	6440573.600	9			

a. Dependent Variable: Y

b. Predictors: (Constant), X3, X1, X2

Sumber: Data diolah 2023

Berdasarkan Tabel 4.10 diketahui hasil uji signifikan simultan (Uji F) di atas menunjukkan nilai sig. $0,003 < 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa variabel Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus berpengaruh secara simultan terhadap pertumbuhan ekonomi karena probabilitas $0,003 < 0,05$

4.5 Pembahasan

4.5.1 Pengaruh Dana Bagi Hasil Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Dana bagi hasil adalah dana yang bersumber dari APBN

berupa pajak dan sumber daya alam, yang dibagi hasilkan kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu dengan memperhatikan potensi daerah penghasil.

Berdasarkan pengujian secara parsial menunjukkan bahwa Variabel Dana bagi hasil dengan nilai signifikan lebih besar dari alpa 0,05 ($0,382 > 0,05$). Yang menunjukkan bahwa variabel dana bsgi hasil tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Banda Aceh. Sehingga dapat disimpulkan jika nilai signifikan $> 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_1 diterima

Dalam penelitian ini, Dana Bagi Hasil (DBH) tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi daerah Kota Banda Aceh. Berikut ini adalah realisasi dana bagi hasil Kota Banda Aceh pada tahun 2010-2019 menunjukkan peningkatan dan penurunan yang setiap tahunnya tidak bisa diprediksi, hal ini menunjukkan pemulihan kondisi perekonomian yang tengah terjadi yang mendorong pemerintah daerah Kota Banda Aceh untuk memperbaiki kondisi perekonomian yang ada.

Hal ini terjadi karena dana bagi hasil yang diperoleh menyesuaikan dengan perekonomian yang terjadi. Seperti pada tahun 2015 dana realisasi dana bagi hasil sebesar Rp 25,039,648,050 yang merupakan dana bagi hasil yang terkecil selama 10 tahun terakhir, hal itu dikarenakan tahun 2015 terjadi (penurunan pendapatan negara dari hasil pajak). Migas yang akan dibagi hasilkan turun signifikan. DBH diturunkan sebesar Rp 11.525.297.798 triliun dari besaran anggaran yang ditetapkan

anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2015, beberapa komponen DBH yang mengalami penurunan dalam RAPBN tahun 2015 adalah DBH pph pasal 25/29 wajib pajak orang pribadi dalam negeri, DBH pajak bumi dan bangunan, dan DBH migas.

Pengalokasian dana bagi hasil kurang berkontribusi maksimal bagi pengeluaran pemerintah Kota Banda Aceh, seperti pembangunan fasilitas sarana publik (bidang infrastruktur, irigasi, pelatihan-pelatihan teknis, penelitian dan sebagainya) yang langsung menyentuh atau di nikmati masyarakat dalam waktu pendek. Selain itu besarnya kuantitas realisasi dana bagi hasil bagi penerimaan Daerah Kota Banda Aceh dalam 10 tahun ini tidak merespon secara menyeluruh (akumulasi) terhadap pertumbuhan ekonomi. Dimana proses multiplier effect secara nyata pada sumber daya manusia Kota Banda Aceh yang bergerak di berbagai sektor produk domestic regional bruto (PDRB).

Selain itu, ketidak sinambungan alokasi serta kualitas dari dana bagi hasil pada pengeluaran pemerintah Kota Banda Aceh dengan berbagai kebijakan melalui program-program pembangunan untuk sektor-sektor yang sesungguhnya di harapkan secara langsung bersentuhan dengan masyarakat, khusus nya sumber daya manusia yang ada di Kota Banda Aceh sebagai faktor produksi bagi aktifitas perekonomian.

4.5.2 Pengaruh Dana Alokasi Umum Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan komponen dari Dana Perimbangan yang sering disebut sebagai dana transfer dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah yang bertujuan untuk meratakan kemampuan keuangan antar daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi sehingga ketimpangan ekonomi antar daerah yang terjadi dapat diatasi.

Berdasarkan pengujian secara parsial menunjukkan bahwa Variabel Dana Alokasi Umum dengan nilai signifikan lebih kecil dari α 0,05 ($0,063 > 0,05$). Yang menunjukkan bahwa variabel dana alokasi umum tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Banda Aceh. Sehingga dapat disimpulkan jika nilai signifikan $> 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_2 diterima

Perkembangan dana alokasi umum di Kota Banda Aceh tahun 2010-2019 mengalami peningkatan namun, laju pertumbuhan tidak serta meningkat melainkan masih pluktuatif. Pertumbuhan dana alokasi umum pada tahun 2010- 2019 sangat bervariasi setiap tahunnya. Seharusnya dengan peningkatan DAU akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah tersebut. Banyak dana yang masuk ke dalam Kota Banda Aceh dengan adanya pengalokasian DAU dari pemerintah Pusat. Jika banyak dana (uang) yang masuk maka ekonomi akan lebih maju, daerah akan semakin produktif, sehingga pada akhirnya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah

Hasil penelitian menunjukkan arah hubungan yang negatif, artinya berarti bahwa kenaikan DAU seharusnya akan menaikkan pertumbuhan ekonomi daerah. Dana yang berasal dari APBN (pemerintah pusat) guna pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, tidak dilakukan secara maksimal oleh daerah. Banyak dana alokasi umum yang dibelanjakan di luar Kota Banda Aceh. Sehingga kenaikan DAU justru akan menurunkan pertumbuhan ekonomi di Kota Banda Aceh.

Dalam penelitian ini, Dana Alokasi Umum (DAU) tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Banda Aceh. Hal ini menunjukkan bahwa penyerapan dana alokasi umum masih belum signifikan oleh karenanya sebaiknya pemerintah memprioritaskan alokasi dan dana alokasi umum pada bidang-bidang yang langsung bersentuhan dengan kepentingan publik, seperti infrastruktur atau fasilitas-fasilitas yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi.

4.5.3 Pengaruh Dana Alokasi Khusus Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Dana alokasi khusus adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional sesuai dengan fungsi yang telah ditetapkan. Berdasarkan pengujian regresi secara parsial menunjukkan bahwa Variabel Dana Alokasi Khusus dengan nilai signifikan lebih kecil dari alfa 0,05 ($0,05 > 0,028$). Yang menunjukkan

bahwa dana alokasi khusus berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Banda Aceh. Sehingga dapat disimpulkan jika nilai signifikan $> 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_3 diterima.

Berdasarkan dana alokasi khusus Kota Banda Aceh selama kurun waktu 2010-2019 selalu mengalami peningkatan namun proporsi terhadap dana alokasi khusus tidak serta meningkat, peningkatan dana alokasi khusus tersebut untuk memenuhi kelengkapan kegiatan pemerintahan yang berfungsi dalam memberi pelayanan kepada masyarakat.

Dana alokasi khusus pemerintah Kota Banda Aceh berdasarkan tinjauan keuangan daerah Provinsi Aceh dalam kurun waktu 2010-2019 menunjukkan belanja tidak langsung setiap tahunnya dibandingkan belanja langsung. Berdasarkan data statistik keuangan daerah provinsi Aceh bahwa rasio belanja operasi kabupaten/kota se Provinsi Aceh pada tahun 2015 sebesar 76,30 persen menunjukkan bahwa realisasi anggaran belanja lebih banyak untuk membiayai kegiatan yang bersifat rutin dibandingkan untuk kegiatan pembangunan fisik.

4.5.4 Pengaruh Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Secara Simultan

Hasil uji signifikan simultan (Uji F) di atas menunjukkan nilai sig. $0,003 < 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa variabel Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus berpengaruh secara simultan terhadap pertumbuhan ekonomi karena probabilitas

0,003 < 0,05. Model koefisien determinasi memiliki kelemahan yakni bias terhadap jumlah variabel independen yang dimasukkan kedalam model. Dalam penelitian ini menggunakan nilai dari Adjusted R^2 untuk mengevaluasi mana model regresi terbaik. Berdasarkan hasil perhitungan uji koefisien determinasi atau Adjusted R^2 diperoleh nilai sebesar 0,825 yang artinya adalah besarnya pengaruh yang ditimbulkan oleh variabel bebas dalam hal ini menjelaskan variabel pertumbuhan ekonomi sebesar 82,5% sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimaksud dalam penelitian ini.

Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana alokasi umum (DAU) dapat diukur dengan 2 indikator yaitu celah fiskal dan alokasi dasar. Dana Alokasi Khusus diberikan kepada daerah apabila daerah menghadapi masalah-masalah khusus. Tujuan dari penggunaan dana alokasi khusus (DAK) dapat diarahkan pada upaya untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang merupakan salah satu isunasional yang perlu dituntaskan.

4.5.5 Pandangan Ekonomi Islam Mengenai Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kota Banda Aceh Tahun 2010-2019

Banyak para ahli ekonomi maupun fikih yang memberikan perhatian terhadap pertumbuhan ekonomi yang menjelaskan bahwa

maksud pertumbuhan ekonomi bukan hanya sebatas aktifitas produksi saja. Lebih dari itu, pertumbuhan ekonomi merupakan aktivitas menyeluruh dalam bidang produksi yang berkaitan erat dengan keadilan distribusi pertumbuhan bukan hanya persoalan ekonomi, melainkan aktivitas manusia yang ditunjukan untuk pertumbuhan dan kemajuan sisi material dan spiritual manusia.

Pengukuran pertumbuhan ekonomi dalam ekonomi islam adalah sama dengan konvensional, hanya saja ada tambahan unsur zakat dalam perhitungan GNP, PDB atau PDRB dalam pembahasan ekonomi islam dapat dijadikan suatu ukuran untuk melihat pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat melalui pendapatan perkapita masyarakat yang menjadi parameter di dalamnya.

Dari data yang ada di Kota Banda Aceh pada tahun 2010-2019 menunjukkan bahwa total PDRB Kota Banda Aceh terus meningkat dan diikuti dengan pendapatan perkapita yang meningkat setiap tahunnya. Pada sisi lain, islam juga memandang pentingnya pemerataan karena pertumbuhan ekonomi tidak menggambarkan kesejahteraan secara menyeluruh terlebih apabila pendapatan dan faktor produksi banyak terpusat bagi sekelompok kecil masyarakat. Adapun perkembangan jumlah Produk domestik regional bruto pada tahun 2010 -2019 pada Tabel 4.11 sebagai berikut:

Tabel 4. 11
Produk Domestik Regional Bruto Kota Banda Aceh Atas Dasar
Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (dalam Jutaan
Rupiah)

Tahun	PDRB Atas Dasar Harga Konstan
2010	Rp 10.062.081.42
Tabel 4.11 Lanjutan	
Tahun	PDRB Atas Dasar Harga Konstan
2011	Rp 10.518.849.16
2012	Rp 11.079.680.15
2013	Rp 11.597.228.47
2014	Rp 12.118.527.34
2015	Rp 12.724.949.07
2016	Rp 13.480.109.89
2017	Rp 13.937.101.46
2018	Rp 14.556.917.28
2019	Rp 15.157.978.10

Sumber:Badan Pusat Statistik tahun 2010-2019 (data diolah)

Berdasarkan Tabel 4.11 di atas dapat diketahui bahwa bahwa produk domestik regional bruto dari tahun 2010 hingga 2019 mengalami peningkatan, peningkatan yang sangat signifikan terjadi pada tahun hampir setiap tahunnya. Setiap tahunnya menunjukkan arah yang positif selama 10 tahun terakhir, ini memberikan indikasi besarnya pengaruh perekonomian terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Banda Aceh.

Berdasarkan data dari BPS dana bagi hasil dari tahun 2010-2019 mengalami fluktuatif dan cenderung kecil dibandingkan kabupaen/kota yang adadi provinsi Aceh, hal ini mengindikasikan bahwa untuk meningkatkan dana bagi hasil setiap tahunnya

pemerintah harus bekerja keras semaksimal mungkin untuk mengoptimalkan potensi daerah yang tersedia.

Berbicara tentang dana bagi hasil di Kota Banda Aceh lebih banyak dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur jalan, dan lain sebagainya sehingga seperti bidang lain kurang mendapat perhatian seperti pendidikan dan kesehatan karena pemerintah hanya berfokus kepada pembangunan infrastruktur, karena seharusnya distribusi anggaran harus dialokasikan ke semua bidang yang menjadi fokus pemerintah. Meskipun terjadi peningkatan pertumbuhan ekonomi, namun meningkatnya pertumbuhan ekonomi masih tidak selalu diiringi dengan meningkatnya pendapatan perkapita Kota Banda Aceh. Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat ketidak signifikan pertumbuhan ekonomi dalam mempengaruhi peningkatan jumlah pendapatan perkapita yang dilihat berdasarkan data BPS. Hal ini juga disebabkan oleh tidak meratanya distribusi pendapatan. Sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Karl Marx yang menyatakan pertumbuhan ekonomi akan berpengaruh terhadap distribusi pendapatan yang semakin timpang. Berdasarkan Tabel 4.11 dijelaskan bahwa pendapatan PDRB ADHK Kota Banda Aceh tahun 2010-2019 masih berfluktuatif. PDRB ADHK tertinggi pada tahun 2019 dengan nilai sebesar Rp 15.157.978.10 dan terendah pada tahun 2010 dengan nilai Rp 11.597.228.47

Tabel 4. 12
Total Pendapatan PDRB Perkapita (dengan Migas) Kota
Banda Aceh Tahun 2010-2019 (dalam persen)

Tahun	Produk Domestik Regional Bruto Per kapita dengan Migas (persen)
2010	44,7
2011	46,86
2012	49,35
2013	52,5
2014	54,11
Tabel 4. 12 Lanjutan	
Tahun	Produk Domestik Regional Bruto Per kapita dengan Migas (persen)
2015	57,91
2016	61,99
2017	64,21
2018	66,46
2019	69,25

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Banda Aceh (data diolah)

Adanya hubungan positif antara pendapatan perkapita terhadap pertumbuhan ekonomi bahwa setiap penurunan tingkat pendapatan perkapita akan diikuti penurunan tingkat PDRB. Jika PDRB terus meningkat, maka pendapatan akan bertambah, sehingga dapat memenuhi kebutuhan dan pada akhirnya akan meningkatkan tingkat pendapatan perkapita itu sendiri.

Dalam ekonomi Islam, target pertumbuhan ekonomi adalah pertumbuhan yang optimal, baik dari segi kesejahteraan material maupun spiritual. Pertumbuhan ekonomi dalam perspektif ekonomi Islam harus menekankan pada aspek aksiologis yang menjunjung tinggi nilai dan moral. kesejahteraan akhirat. Dalam Islam tidak

diperbolehkan mengkonsumsi modal yang berlebihan dan berlebihan yang membebankan pengorbanan yang tidak wajar bagi manusia. Untuk mencapai kehidupan yang lebih baik harus ada tujuan yang dicapai dengan pengorbanan yang dilakukan tanpa merugikan orang lain. Diantaranya adalah peningkatan pendapatan per kapita yang dilaksanakan melalui distribusi bahan-bahan pokok yang dibutuhkan untuk hidup seperti pangan, perumahan, kesehatan, dan perlindungan sosial ilmu ekonomi, bekerja dengan asumsi-asumsi ceteris paribus. Dalam konteks ini, Keynes pernah mengatakan, “Kita terkungkung dan kehabisan energi dalam perangkat teori dan implementasi ilmu ekonomi kapitalis yang ternyata tetap saja mandul untuk melakukan terobosan mendasar guna mencapai kesejahteraan dan kualitas hidup umat manusia di muka bumi ini”.

Melihat dari anggaran dana bagi hasil, dana alokasi khusus, dan dana alokasi umum yang ada di Kota Banda Aceh yang cukup besar akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. Semakin besar modal yang dimiliki pemerintah Kota Banda Aceh maka semakin meningkat pula pertumbuhan ekonominya. Menurut M. Umer Chapra memandang suatu pembangunan ekonomi harus ada pembangunan moral individu, adanya peran pemerintah, pembagian kekayaan dan pemerataan, budaya menabung dan investasi tinggi, support positif peran negara serta motivasi sangat penting.

BAB V KESIMPULAN

5.1 Kesimpulan

Kesimpulan hasil penelitian analisis pengaruh desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi di tinjau dari perspektif ekonomi islam di Kota Banda Aceh tahun 2010-2019 adalah sebagai berikut:

1. Variabel Dana Bagi Hasil tidak pengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kota Banda Aceh. Variabel Dana Bagi Hasil dengan nilai signifikan lebih besar dari alpa 0,05 %. Hal ini terjadi karena dana bagi hasil yang diperoleh menyesuaikan dengan perekonomian yang terjadi. Seperti pada tahun 2015 dana realisasi dana bagi hasil sebesar Rp 25.039.648.050 yang merupakan dana bagi hasil yang terkecil selama 10 tahun terakhir, hal itu dikarenakan tahun 2015 terjadi (penurunan pendapatan negara dari hasil pajak). Migas yang akan dibagi hasilkan turun signifikan. DBH diturunkan sebesar Rp 11.525.297.798 triliun dari besaran anggaran yang ditetapkan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2015, beberapa komponen DBH yang mengalami penurunan dalam RAPBN tahun 2015 adalah DBH pph pasal 25/29 wajib pajak orang pribadi dalam negeri, DBH pajak bumi dan bangunan, dan DBH migas. Pengalokasian dana bagi hasil kurang berkontribusi maksimal bagi pengeluaran pemerintah Kota Banda Aceh, seperti pembangunan fasilitas sarana publik

(bidang infrastruktur, irigasi, pelatihan-pelatihan teknis, penelitian dan sebagainya) yang langsung menyentuh atau dinikmati masyarakat dalam waktu pendek. Selain itu besarnya kuantitas realisasi dana bagi hasil bagi penerimaan Daerah Kota Banda Aceh dalam 10 tahun ini tidak merespon secara menyeluruh (akumulasi) terhadap pertumbuhan ekonomi. Dimana proses multiplier effect secara nyata pada sumber daya manusia Kota Banda Aceh yang bergerak di berbagai sektor produk domestic regional bruto (PDRB).

2. Variabel Dana Alokasi Umum tidak berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kota Banda Aceh. Variabel Dana Alokasi Umum dengan nilai signifikan lebih kecil dari alpa Perkembangan dana alokasi umum di Kota Banda Aceh tahun 2010-2019 mengalami peningkatan namun, laju pertumbuhan tidak serta meningkat melainkan masih pluktuatif. Pertumbuhan dana alokasi umum pada tahun 2010-2019 sangat bervariasi setiap tahunnya. Seharusnya dengan peningkatan DAU akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah tersebut. Banyak dana yang masuk ke dalam Kota Banda Aceh dengan adanya pengalokasian DAU dari pemerintah Pusat. Jika banyak dana (uang) yang masuk maka ekonomi akan lebih maju, daerah akan semakin produktif, sehingga pada akhirnya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. Hasil penelitian menunjukkan arah hubungan yang negatif, artinya berarti bahwa kenaikan DAU seharusnya akan menaikkan pertumbuhan ekonomi

daerah. Dana yang berasal dari APBN (pemerintah pusat) guna pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, tidak dilakukan secara maksimal oleh daerah. Banyak dana alokasi umum yang dibelanjakan di luar Kota Banda Aceh. Sehingga kenaikan DAU justru akan menurunkan pertumbuhan ekonomi di Kota Banda Aceh.

3. Variabel Dana Alokasi Khusus berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan Ekonomi di Kota Banda Aceh. Variabel Dana Alokasi Khusus dengan nilai signifikan lebih kecil dari α 0,05 ($0,000 < 0,05$). Berdasarkan dana alokasi khusus Kota Banda Aceh selama kurun waktu 2010-2019 selalu mengalami peningkatan namun proporsi terhadap dana alokasi khusus tidak serta meningkat, peningkatan dana alokasi khusus tersebut untuk memenuhi kelengkapan kegiatan pemerintahan yang berfungsi dalam memberi pelayanan kepada masyarakat. Dana alokasi khusus pemerintah Kota Banda Aceh berdasarkan tinjauan keuangan daerah Provinsi Aceh dalam kurun waktu 2010-2019 menunjukkan belanja tidak langsung setiap tahunnya dibandingkan belanja langsung. Berdasarkan data statistik keuangan daerah provinsi Aceh bahwa rasio belanja operasi kabupaten/kota se Provinsi Aceh pada tahun 2015 sebesar 76,30 persen menunjukkan bahwa realisasi anggaran belanja lebih banyak untuk membiayai kegiatan yang bersifat rutin dibandingkan untuk kegiatan pembangunan fisik.

4. Variabel X1 (Dana bagi hasil), X2 (Dana alokasi umum), X3 (Dana alokasi khusus) secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel Y (pertumbuhan ekonomi) di Kota Banda Aceh pada tahun 2010-2019.
5. Pertumbuhan Ekonomi merupakan satu sarana untuk menjamin tegaknya keadilan sosial secara kekal. Keadaan ekonomi di Kota Banda Aceh dari sisi dana bagi hasil, dana alokasi umum dan dana lokasi khusus meningkatkan pertumbuhan ekonomi, akan tetapi pemerataannya belum tercapai secara maksimal, selain itu devisa anggaran juga mempengaruhi jumlah belanja pemerintah. Dalam islam penerimaan zakat dan sedekah merupakan sumber pokok pendapatan. Hal ini berkaitan dengan pengoptimalan keuangan publik. Masyarakat memiliki tanggung jawab untuk patuh dalam membayar pajak maupun zakat yang penerimaan pemerintah tersebut dialokasikan guna pembangunan ekonomi yang baik dan berkelanjutan. Dalam perspektif ekonomi islam harus menekankan aspek aksiologis yang lebih menjunjung tinggi nilai dan moral yang tujuan kepada pertumbuhan ekonomi yang ada tidak hanya kesejahteraan materi tetapi lebih diorientasikan kepada kesejahteraan dunia akhirat.

5.2 Saran

Berdasarkan dari hasil penelitian di atas dan dari kesimpulan yang didapat maka, beberapa saran diajukan yang berkaitan dengan hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kepada pemerintah Kota Banda Aceh diharapkan dapat meningkatkan pelayanan publik yang memadai sehingga dapat menjadi stimulus pertumbuhan ekonomi serta mengalokasikan anggaran daerah kebelanjayang lebih untuk meningkatkan perekonomian seperti alokasi belanja modal untuk sarana dan prasarana, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan maupun untuk fasilitas publik seperti pembangunan, infrastruktur dan lain-lain
2. Bagi pemerintah Kota Banda Aceh dalam mengalokasikan dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus secara lebih efektif dan efisien agar meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berorientasi ada pendapatan perkapita dan lebih bisa berkontribusi langsung pada semua lapisan masyarakat.
3. Bagi akademisi dan peneliti selanjutnya, dengan adanya hasil penelitian ini diharapkan bisa dijadikan sebuah bahan referensi mengajarnya dan penelitian. Dikarenakan penelitian ini masih memiliki kekurangan seperti keterbatasan dalam memperoleh data dan periode waktu yang digunakannya 10 tahun. Sehingga penelitian selanjutnya diharapkan mampu meneliti dengan menambahkan variabel bebas lainnya serta menambah tahun penelitian sehingga mampu memberikan hasil penelitian yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

Al-quran dan Terjemahannya

Abdullah Abdul Husain at-taqiri, ekonomi islam, Magistra insania
press: Yogyakarta, 2004

Ade Dede, Rohayana, "Ekonomi Islam Pendekatan al-Qur'an dan
Hadith," *Religia*, Vol. 3, No. 1, Februari 2000.

Anita, Mohammad, S., & Hamzah, A. (2014). PENGARUH
DESENTRALISASI FISKAL TERHADAP
PERTUMBUHAN. *Jurnal Ilmu Ekonomi Pascasarjana
Universitas Syiah Kuala*, 2(3), 21-29.

Almizan, Pembangunan Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal
kajian ekonomi Islam Vol 1 Nomor 2*, Tahun 2016

Any Setianingrum, Desentralisasi Fiskal Kontemporer Dalam
Perspektif Kebijakan Publik Islam, *Ekonomika-Bisnis Vol. 4
No.1 Bulan Januari Tahun 2013*

Andi famrizal, Analisis Faktor Ekonomi Dan Faktor Non Ekonomi
Terhadap Kesadaran Masyarakat Membayar Pajak Bumi Dan
Bangunan (Pbb) Di Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi,
Jurnal Katalogis, Volume 5 Nomor 8, Agustus 2017

A.W. Widjaja, otonomi daerah dan daerah otonom, Jakarta: PT
Raja grafindopersada, 2002

Atmaja Lukas Setia, Statistik Untuk Bisnis dan Ekonomi,
Yogyakarta: ANDI, 2011

BPS. (2023). *Produk Domestik Regional Bruto Per Kapita Per*

- Kabupaten/Kota (Juta Rupiah), 2017-2019.* Aceh: BPS Provinsi Aceh.
- Departemen Agama Republik Indonesia, Al-qur'an dan terjemahnya, PT Riels grafika, 2009
- Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: PT Gramedia pustaka utama cetakan ke-empat, 2011
- Djojohadikusumo Sumitro, Perkembangan Pemikiran Ekonomi Dasar Teori Pertumbuhan Dan Ekonomi Pembangunan, Jakarta: PT Pustaka LP3ES Indonesia, 1994
- Gebhy. (2022). Instrumen dan Komponen Kebijakan Fiskal Islami. <https://doi.org/10.31219/osf.io/2nrxc>
- Gusfahmi, pajak menurut syari'ah, Jakarta: Rajawali pers, 2011
- hakim Lukman, prinsip-prinsip Ekonomi islam, Surakarta: Penerbit Erlangga, 2012
- Hasan Iqbal, Analisis Data Penelitian Dengan Statistik, Jakarta: Bumi Aksara, 2008
- Huda Nurul, Keuangan Publik Islam: Pendekatan Teoritis dan Sejarah, Jakarta: Kencana, 2012
- Hadi Sutrisno, Metode Research, Yogyakarta: ANDI, 2002
- Jusuf SK, otonomi daerah dipersimpangan jalan (Jakarta: cetakan kedua pustaka spirit, 2012), Hal. 29
- Khursid Ahmad, *Economic Development in Islamic Framework*, (Liecester he Islamic Fondation, 1980).
- LKPD. Laporan Realisasi Anggaran 2019. 5 agustus 2023. From: https://bpkk.bandaacehkota.go.id/?page_id=5505

- M.A. Mannan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, terj. M. Nastngin, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1997).
- M. Umer Chapra, *Al-Qur'an menuju Sistem Moneter Yang Adil*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1997), h. 127
- Nafi'ah, B., Arifin, N. R., & Haq, F. (2021). MODEL INSTRUMEN KEBIJAKAN FISKAL ISLAM DALAM PENANGANAN COVID-19. *Ulumuna: Jurnal Studi Keislaman*, 7(1), 71–89. <https://doi.org/10.36420/ju.v7i1.4924>
- Priyono, S. (2017). Zakat Sebagai Instrumen dalam Kebijakan Fiskal. *Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, I(2), 126-142.
- Suciayu, D., & Wibawa, F. (2012). DESENTRALISASI FISKAL DAN PENGARUHNYA TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI PROPINSI YOGYAKARTA. *Signifikan*, 1(1), 13-26. <https://doi:10.15408/sjie.v1i1.2593>

LAMPIRAN

Lampiran 1 Data PDRB Kota Banda Aceh ADHK Menurut Lapangan Usaha Tahun 2010 – 2019 (dalam jutaan rupiah)

PDRB Kota Banda Aceh ADHK Menurut Lapangan Usaha Tahun 2010 – 2019

Tahun	PDRB Atas Dasar Harga Konstan
2010	Rp 10.062.081.42
2011	Rp 10.518.849.16
2012	Rp 11.079.680.15
2013	Rp 11.597.228.47
2014	Rp 12.118.527.34
2015	Rp 12.724.949.07
2016	Rp 13.480.109.89
2017	Rp 13.937.101.46
2018	Rp 14.556.917.28
2019	Rp 15.157.978.10

Rumus mengukur pertumbuhan ekonomi suatu negara:

$$Gt = ((PBDt - PBDt-1) / PBDt-1) \times 100\%.$$

Keterangan:

GT = Laju pertumbuhan ekonomi

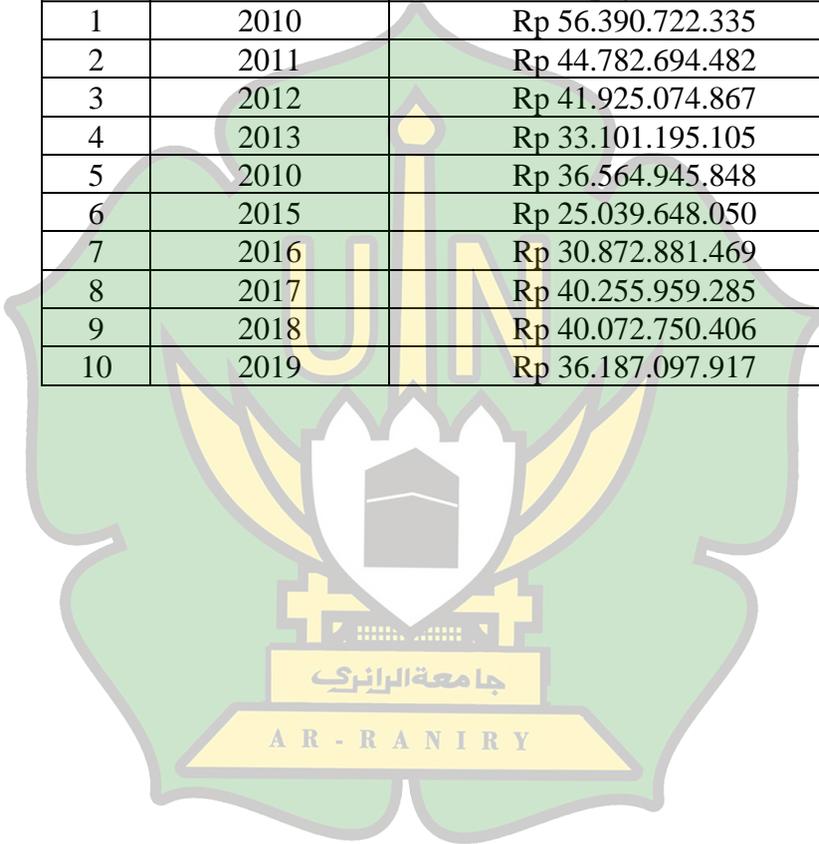
PBDt = Nilai PDB periode t

PBDt-1 = Nilai PDB periode sebelumnya

**Lampiran 2 Data Realisasi Dana Bagi Hasil Kota Banda Aceh
Tahun 2010-2019**

Realisasi Dana Bagi Hasil Tahun 2014-2019

NO	Tahun	Dana Bagi Hasil (pajak + non pajak)
1	2010	Rp 56.390.722.335
2	2011	Rp 44.782.694.482
3	2012	Rp 41.925.074.867
4	2013	Rp 33.101.195.105
5	2010	Rp 36.564.945.848
6	2015	Rp 25.039.648.050
7	2016	Rp 30.872.881.469
8	2017	Rp 40.255.959.285
9	2018	Rp 40.072.750.406
10	2019	Rp 36.187.097.917



Lampiran 3 Data Realisasi Dana Alokasi Umum Kota Banda Aceh Tahun 2010-2019

Realisasi Dana Alokasi Umum Tahun 2010-2019

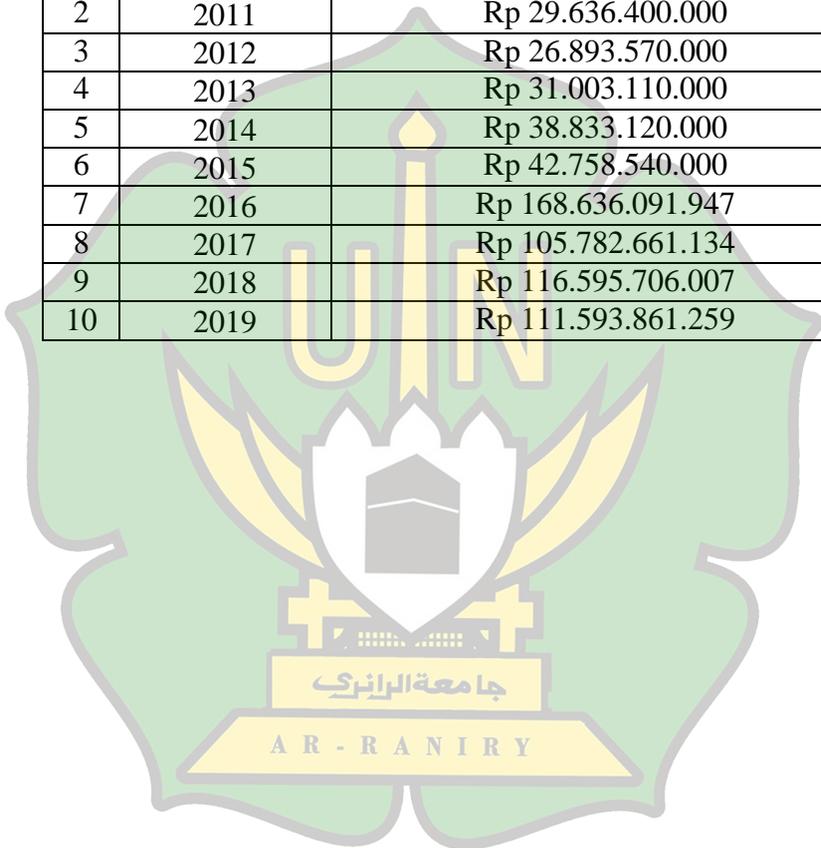
NO	Tahun	Dana Alokasi umum
1	2010	Rp 328.073.282.000
2	2011	Rp 406.480.305.000
3	2012	Rp 491.593.554.000
4	2013	Rp 567.628.828.000
5	2014	Rp 610.554.730.000
6	2015	Rp 612.503.568.000
7	2016	Rp 602.292.108.000
8	2017	Rp 591.711.772.000
9	2018	Rp 591.711.772.000
10	2019	Rp 605.014.830.000



Lampiran 4 Data Realisasi Dana Alokasi Khusus Kota Banda Aceh Tahun 2010-2019

Realisasi Dana Alokasi Khusus Tahun 2010-2019

NO	Tahun	Dana Alokasi Khusus
1	2010	Rp 21.351.600.000
2	2011	Rp 29.636.400.000
3	2012	Rp 26.893.570.000
4	2013	Rp 31.003.110.000
5	2014	Rp 38.833.120.000
6	2015	Rp 42.758.540.000
7	2016	Rp 168.636.091.947
8	2017	Rp 105.782.661.134
9	2018	Rp 116.595.706.007
10	2019	Rp 111.593.861.259



**Lampiran 5 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Banda Aceh
Tahun 2010-2019**

**Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Banda Aceh
Tahun 2010-2019**

NO	Tahun	Laju Pertumbuhan
1	2010	4,01
2	2011	4,54
3	2012	5,33
4	2013	4,67
5	2014	4,50
6	2015	5,00
7	2016	5,93
8	2017	3,39
9	2018	4,49
10	2019	4,18

Lampiran 6

Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		10
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000005
	Std. Deviation	257636575.643
Most Extreme Differences	Absolute	.20853
	Positive	.158
	Negative	-.118
Test Statistic		.158
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

- a. Test distribution is Normal.
- b. Calculated from data.
- c. Lilliefors Significance Correction.
- d. This is a lower bound of the true significance.

Lampiran 7

Hasil Pengujian Multikolinearitas

Coefficients^a

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	X1	.273	3.660
	X2	.193	5.178
	X3	.477	2.098

a. Dependent Variable: Y



Lampiran 8

Hasil Pengujian Autokorelasi Model Summary^b

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.952 ^a	.907	.861	315539074.702	1.867

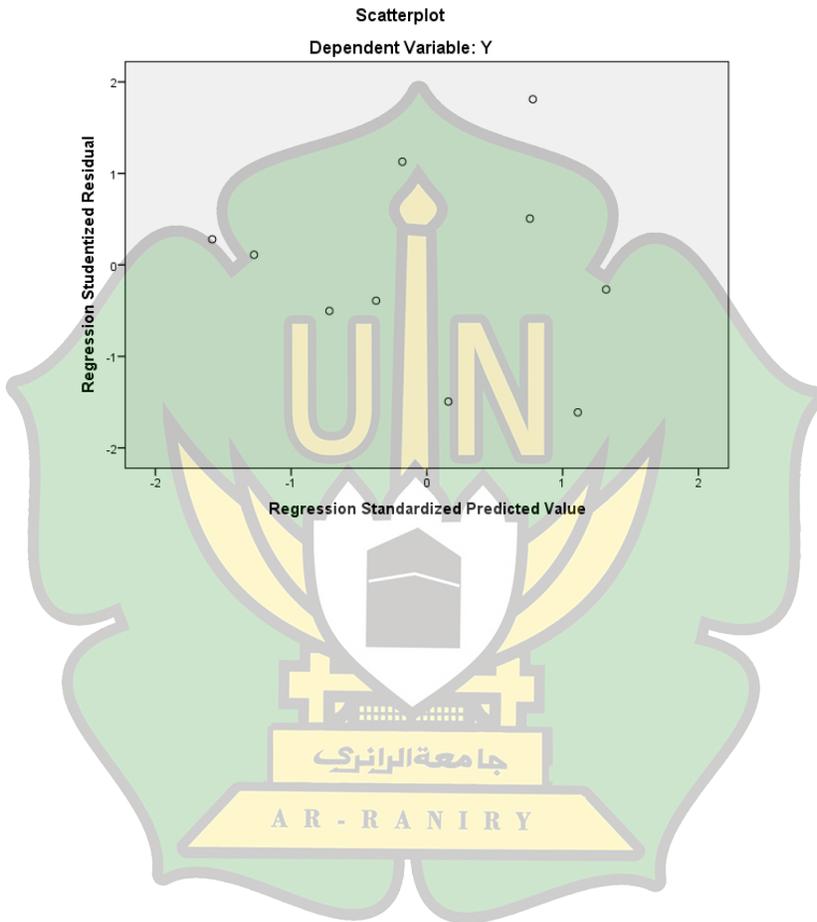
a. Predictors: (Constant), X3, X1, X2

b. Dependent Variable: Y



Lampiran 9

Pengujian Heteroskedastisitas



Lampiran 10

Hasil Uji T
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	1206824543.683	2094592668.177		-.576	.585
X1	.062	.031	.480	2.016	.090
X2	.008	.002	.964	3.408	.014
X3	.006	.003	.359	1.993	.093

a. Dependent Variable: Y



Lampiran 11

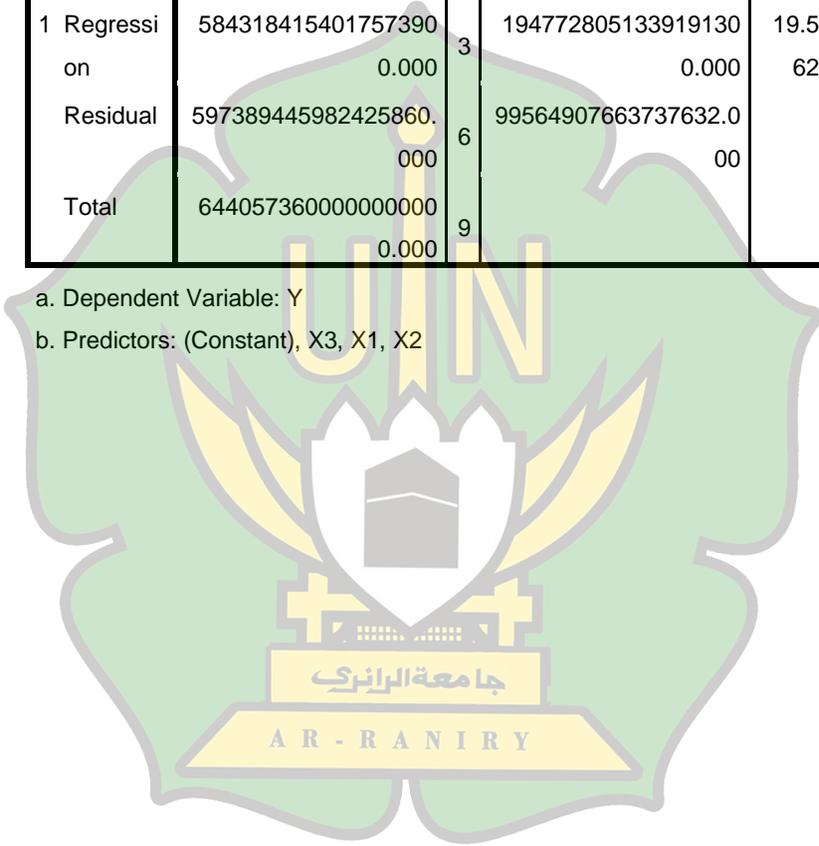
Hasil Uji F

ANOVA^a

Model	Sum of Squares	d f	Mean Square	F	Sig.
1 Regressi on	584318415401757390 0.000	3	194772805133919130 0.000	19.5 62	.00 2 ^b
Residual	597389445982425860. 000	6	99564907663737632.0 00		
Total	644057360000000000 0.000	9			

a. Dependent Variable: Y

b. Predictors: (Constant), X3, X1, X2



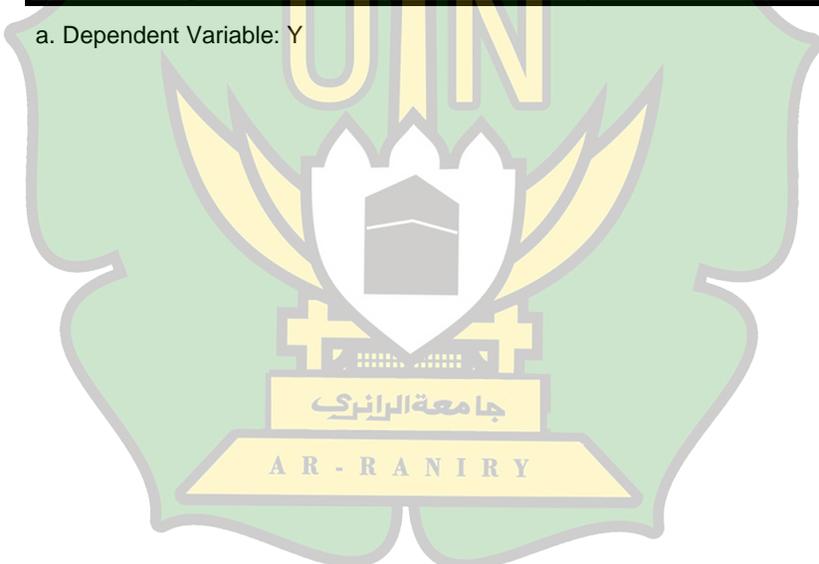
Lampiran 12

Hasil Analisis Regresi Berganda

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-1206824543.683	2094592668.177		-.576	.585
X1	.062	.031	.480	2.016	.090
X2	.008	.002	.964	3.408	.014
X3	.006	.003	.359	1.993	.093

a. Dependent Variable: Y



Lampiran 13

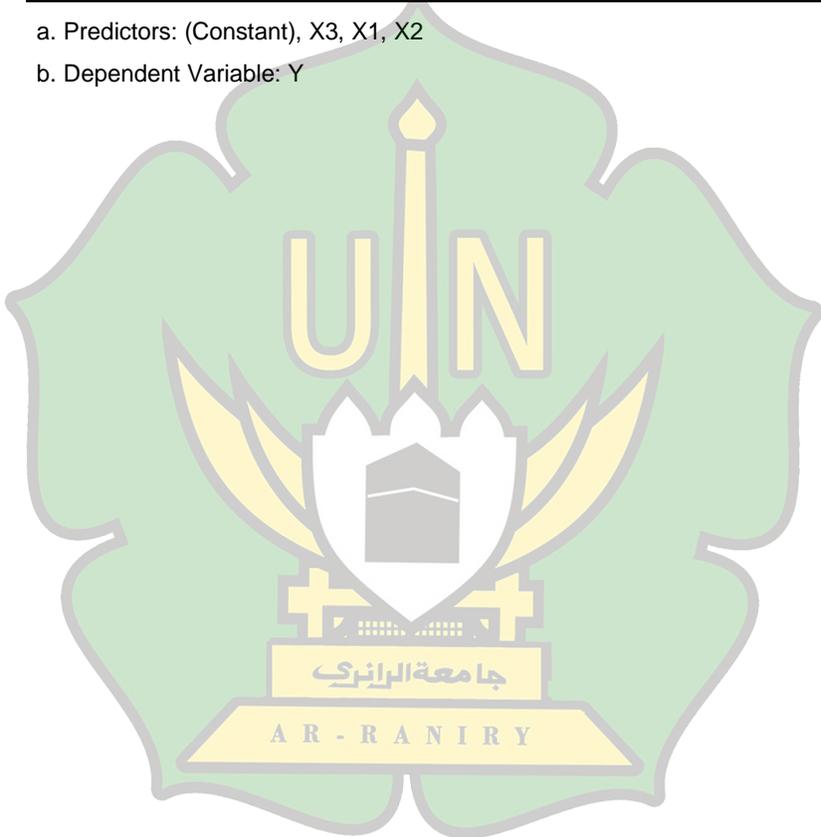
Hasil Pengujian Auto Korelasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.952 ^a	.907	.861	315539074.702	1.867

a. Predictors: (Constant), X3, X1, X2

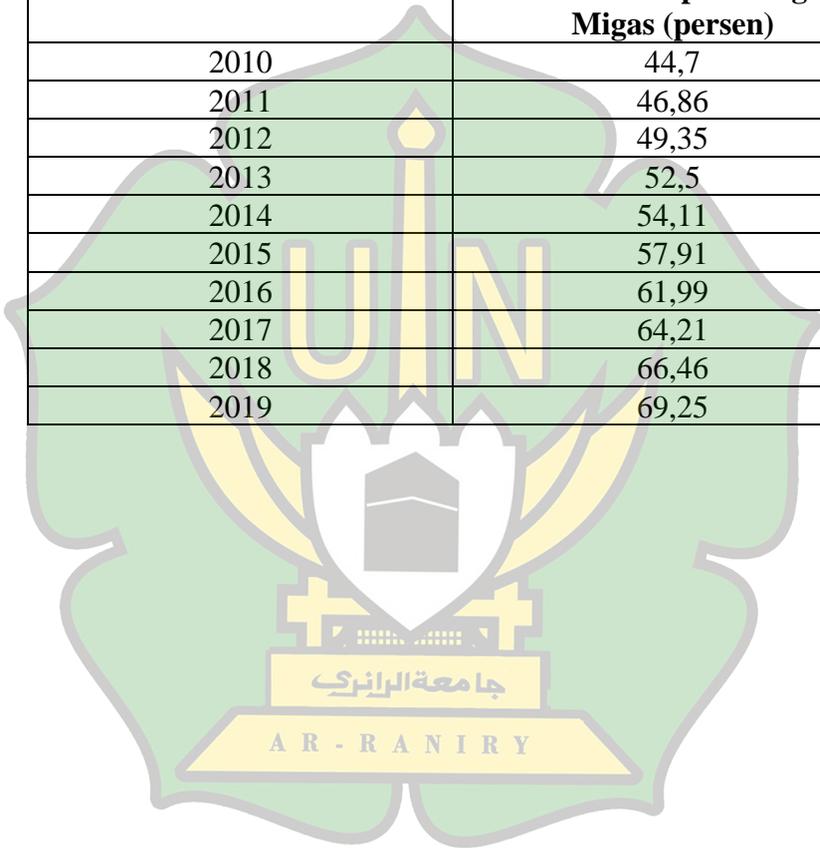
b. Dependent Variable: Y



Lampiran 14

Total Pendapatan PDRB Perkapita Kota Banda Aceh Tahun 2010-2019 (dalam persen)

Tahun	Produk Domestik Regional Bruto Per kapita dengan Migas (persen)
2010	44,7
2011	46,86
2012	49,35
2013	52,5
2014	54,11
2015	57,91
2016	61,99
2017	64,21
2018	66,46
2019	69,25



Lampiran 15

RIWAYAT HIDUP PENULIS

Nama Lengkap : T Khairul Fahmi
Tempat/Tanggal Lahir: Aceh Timur / 10 April 1997
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : Islam
Kebangsaan/Suku : Indonesia/Aceh
Status : Belum Kawin
Pekerjaan/NIM : Mahasiswa/160602141
Alamat : Syiah Kuala, Banda Aceh
Telp/HP : 081264370418
Email : tkhairulfahmi10@gmail.com

Riwayat Pendidikan

- a. SD/MI : SDN 55 Banda Aceh Berijazah
Tahun : 2003-2009
- b. SLTP/MTs : SMPN 18 Banda Aceh
Tahun : 2009-2013
- c. SMA/MA : SMAN 8 Banda Aceh
Tahun : 2013-2016
- d. Perguruan Tinggi : Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi
dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry,
Tahun Masuk 2016

Banda Aceh, 21 Agustus 2023
Penulis,

(T Khairul Fahmi)